

SKRIPSI

**PENERAPAN *THE POLICY OF PEACE AND PROSPERITY*
DALAM UPAYA REUNIFIKASI KOREA SELATAN DENGAN
KOREA UTARA PERIODE 2017-2108**

Diajukan Oleh

Ima Ganis Mutia Sari

14323104

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PENERAPAN *THE POLICY OF PEACE AND PROSPERITY*
DALAM UPAYA REUNIFIKASI KOREA SELATAN DENGAN
KOREA UTARA PERIODE 2017-2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan Internasional Pada Program Strata I Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Diajukan Oleh

Ima Ganis Mutia Sari

14323104

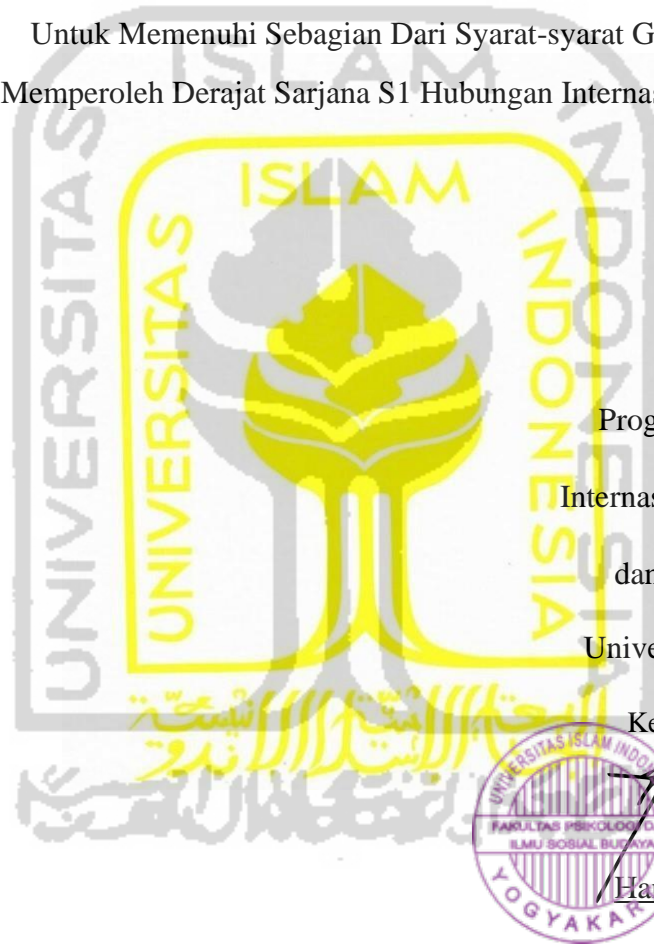
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PENERAPAN *THE POLICY OF PEACE AND PROSPERITY* DALAM
UPAYA REUNIFIKASI KOREA SELATAN DENGAN KOREA UTARA
PERIODE 2017-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Hangga Fathana, S.IP.,
B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int, M.A.

Tanda Tangan


Karina
Utami Dewi

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Ima Ganis Mutia Sari
No. Mahasiswa : 14323104
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Penerapan *The Policy of Peace and Prosperity*
Dalam Upaya Reunifikasi Korea Selatan
dengan Korea Utara Periode 2017-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindak pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Juli 2020



Ima Ganis Mutia Sari

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

Kedua Orang Tua

Terima kasih atas dukungan finansial yang selama ini diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ima Ganis Mutia Sari

Terima kasih sudah memilih untuk tidak menyerah meskipun ada banyak kesempatan untuk memilih menyerah. Kamu telah memilih keputusan yang sangat baik, Terima kasih.

Semua Teman-teman

Terima kasih atas doa, nasehat dan berbagai pertanyaan “*kapan*” yang selalu kalian lontarkan. Berkat dorongan dari kalian skripsi ini selesai.

HALAMAN MOTTO

“When you do something you don't like, it feels like you have won against yourself. That kind of feeling is nice”

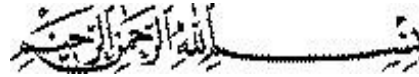
-Byun Baekhyun-

“Karena sesudahnya kesulitan itu ada kemudahan”

-Q.A. Al-Insyirah-



KATA PENGANTAR



Segala puja puji dan syukur tiada hingga ke hadirat Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., M.Ag., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP.,B selaku Kapordi dan dosen, serta dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak Irawan Jati,

S.IP.,B.Int.St., M.A., Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistria. S.sos., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D serta seluruh dosen-dosen UII. Terima kasih atas ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat tahun ini.

3. Bapak Enggar Furi, S.IP., M.A. Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan dukungan, motivasi dan arahan dari awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi, juga berkenan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam mengurus administrasi dan membimbing penulis pada skripsi ini. Penulis meminta maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang lebih mulia.
4. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
5. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat- surat kebutuhan penelitian, serta memberi kemudahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
6. Keluarga tersayang, atas dukungan finansial dan kasih sayang.

7. Teman-teman seperjuangan masa kuliah Desy, Acha, Regina, Rizqya,
Tanpa kalian masa kuliahku akan hampa tanpa cerita.
8. Do Kyungsoo dan Hwang Renjun, terima kasih atas kata-kata yang
diucapkan melalui artikel wawancara dan siaran radio yang menjadi
titik balik dan mengubah pola pikirku dalam memandang kehidupan.
9. Byun Baekhyun, terima kasih atas nasehat tidak langsung yang
mengubah pola pikirku sehingga skripsi ini selesai.
10. Semua playlist spotify yang tidak pernah bosan menemaniku mencari
data dan menulis skripsi ini sampai selesai.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Signifikansi.....	4
1.5 Cakupan Penelitian.....	5
1.6 Kajian Pustaka.....	6
1.7 Landasan Teori/Konsep.....	10
1.7.1 <i>Rational Actor Model</i>	10
1.7.2 <i>The Organizational Progress</i>	10
1.7.3 <i>Bureaucratic/Governmental Politic</i>	11
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Metode Penelitian.....	15
1.8.2 Subyek Penelitian.....	15
1.8.3 Metode Pengambilan Data.....	15
1.8.4 Metode Analisis Data.....	16
BAB II PERAN PEMERINTAHAN KOREA SELATAN DALAM MENJALANKAN <i>THE POLICY OF PEACE AND PROSPERITY</i> DAN BENTUK-BENTUK KETIDAKSETUJUAN TERHADAP KEBIJAKAN TERSEBUT.....	17
2.1 Birokrasi Pemerintahan Korea Selatan.....	17
2.1.1 <i>Executive branch</i>	17
2.1.2 <i>Legislative Branch</i>	19
2.1.4 Kepemimpinan Moon Jae-In.....	23
2.2 Penerapan <i>The Policy of Peace and Prosperity</i>	26
2.2.1 Langkah-langkah Moon Jae-In dalam menerapkan kembali <i>The Policy of Peace and Prosperity</i>	26
2.2.2 Deklarasi Panmunjom.....	28
2.2.3 Langkah Internasional.....	30

2.3	Bentuk Ketidaksetujuan terhadap <i>The Policy of Peace and Prosperity</i>	32
2.3.1	Ketidaksetujuan Ratifikasi Perjanjian Pyongyang dan Deklarasi Panmunjom	33
2.3.2	Skeptisisme Publik	34
2.3.4	<i>Taegukgi Rallies</i>	36

BAB III ANALISIS BEREUCRATHIC POLITIC TERHADAP THE POLICY OF PEACE AND PROSPERITY PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-IN38

3.1	Posisi menentukan aksi	38
3.1.1	<i>Chief and Staff</i>	39
3.1.2	<i>Indian</i>	39
3.1.3	<i>Ad Hoc</i>	40
3.2	Prioritas inti, Persepsi dan Inti dari Permasalahan	41
3.3	Kepentingan, Resiko, dan Kekuasaan	43
3.4	Permasalahan dalam Permasalahan	44
3.5	<i>Action Channels</i>	47
3.6	Aksi sebagai Politik	49
3.7	<i>Streams of outcomes</i>	51

BAB IV PENUTUP53

4.1	Kesimpulan	53
4.2	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA56

ABSTRAK

Korea selatan dan Korea utara telah menjadi kedua negara berdaulat yang sangat bertolak belakang sejak perang Korea yang terjadi pada 1950. Keduanya mengalami berbagai konflik bersenjata di wilayah perbatasan, hingga pada saat Korea selatan menerapkan *The Policy of Peace and Prosperity*, konflik tersebut secara bertahap mulai berkurang. Kebijakan tersebut tidak diterapkan lagi setelah gagal menekan percobaan nuklir Korea utara pada tahun 2008. Kemudian mulai diterapkan lagi ketika tahun 2017 Moon Jae-In memenangkan pemilu presiden sehingga terjadi pergeseran ideologi dari pemerintahan konservatif menjadi pemerintahan liberal. Dari sini kemudian *The policy of Peace and Prosperity* dijalankan dan mendapat berbagai macam respon dari banyak pihak, terutama pihak oposisi yang menolak keras kebijakan tersebut sebab perbedaan ideologi dan pandangan terhadap Korea utara. Penolakan juga didapat dari sekutu Korea selatan, yaitu Amerika yang menganggap kebijakan ini tidak efektif sebab pernah gagal pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun. Akan banyak terjadi tarik-menarik kepentingan terutama di ranah Majelis Nasional yang melibatkan kedua partai yang merepresentasikan kedua ideologi yaitu DPK dan LKP. Penelitian ini akan menganalisis dengan pandangan teori *Bureaucratic Politic* langkah-langkah pemerintahan Moon Jae-In dalam menjalankan *The Policy of Peace and Prosperity*.

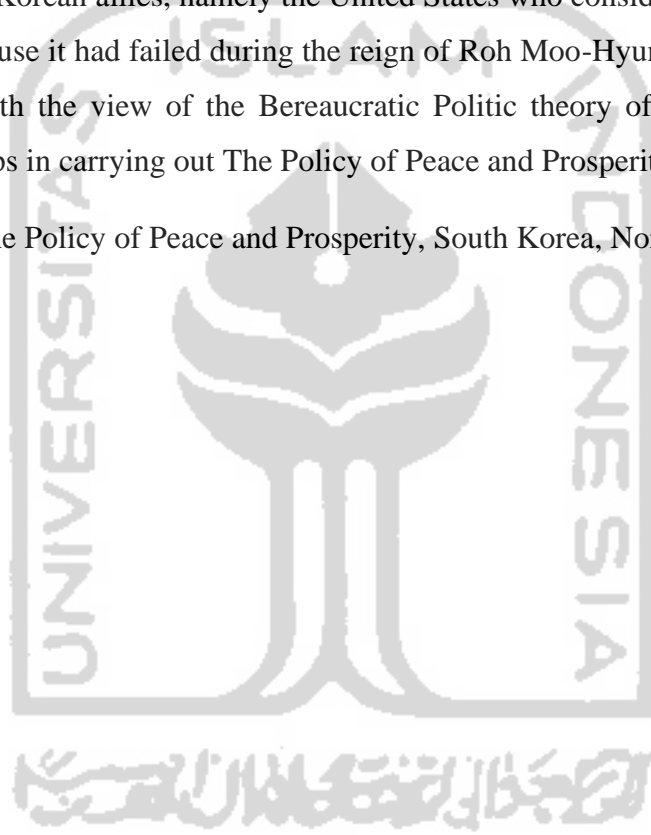
Kata Kunci : *The Policy of Peace and Prosperity*, Korea selatan, Korea utara

ABSTRACT

South Korea and North Korea have become the two sovereign countries that have been very contradictory since the Korean war that occurred in 1950. Both experienced various armed conflicts in the border region, until when South Korea

adopted the Policy of Peace and Prosperity, the conflict gradually began to diminish . The policy was not implemented again after failing to suppress the North Korean nuclear test in 2008. Then it began to be implemented again when in 2017 Moon Jae-In won the presidential election resulting in an ideological shift from a conservative government to a liberal government. From here then the policy of Peace and Prosperity was carried out and received various responses from many parties, especially the opposition who strongly opposed the policy because of differences in ideology and views on North Korea. The rejection was also obtained from the South Korean allies, namely the United States who considered this policy ineffective because it had failed during the reign of Roh Moo-Hyun. This research will analyze with the view of the Bureaucratic Political theory of Moon Jae-In's government steps in carrying out The Policy of Peace and Prosperity.

Key words : The Policy of Peace and Prosperity, South Korea, North Korea



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebelum Moon Jae-In menjabat sebagai Presiden Korea selatan, dua Presiden Korea selatan sebelumnya, yaitu Lee Myung-Bak dan Park Geun-Hye yang berasal dari partai beraliran konservatif. Pemerintahan konservatif Korea selatan melihat Korea utara sebagai musuh yang dapat mengancam perdamaian dengan kepemilikan nuklirnya. Presiden Park Geun-Hye menerapkan kebijakan *Trust Politik* dimana kepercayaan dapat dibangun melalui dialog dan menghargai janji yang sudah dibuat oleh kedua negara. *Trust Politik* mencakup berbagai proyek seperti pertukaran budaya, kerjasama ekonomi, dan membantu Korea utara bergabung dengan lembaga keuangan internasional. (Cordesman & Hess, 2013) Namun dengan peralihan kepemimpinan Korea utara pada Kim Jong-Un, kebijakan *Trust Politik* tersebut tidak berjalan lancar. Kim Jong-Un memutuskan untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata perang Korea tahun 1953, kemudian melakukan percobaan nuklir lagi pada tahun 2016 dan menyebabkan dijatuhkannya sanksi ekonomi terhadap Korea utara oleh PBB, dengan menutup Industri Kaesong yang merupakan bentuk kerja sama kedua Korea. (Park S. , 2017). Presiden wanita pertama Korea selatan ini pada akhirnya diberhentikan dari jabatannya karena terlibat dalam skandal korupsi (Alfira, 2017).

Moon Jae-In kemudian menggantikan Park Geun-Hye dengan memenangkan pemilu Presiden Korea selatan pada tahun 2017. Hal ini mempengaruhi banyak hal, terutama kebijakan Korea selatan terhadap Korea utara. Presiden Moon Jae-In memiliki potensi untuk menjadikan *The Policy of Peace and Prosperity* sebagai senjata dalam menjalankan upaya reunifikasi dengan Korea utara. Meski begitu, kebijakan yang mengedepankan kerja sama ini belum bisa berjalan sepenuhnya karena sanksi ekonomi yang dipimpin oleh Amerika pada Korea utara masih berlaku. Sanksi ekonomi ini hanya akan dicabut apabila Korea utara telah melucuti segala bentuk senjata nuklir dan rudalnya. (Park S. N., Moon's Secret Weapons Is Sunshine, 2017).

The Policy of Peace and Prosperity yang diterapkan kembali oleh Moon Jae-In. Moon Jae-In berhasil membujuk Korea utara untuk berdamai dan mengeluarkan Deklarasi Panmunjom sebagai bentuk perdamaian kedua negara. meski disambut baik oleh dunia internasional, namun pertemuan tersebut menimbulkan protes dari warga Korea selatan. Protes tersebut dilakukan oleh warga berusia lanjut yang mengalami pahitnya masa lalu ketika perang Korea berlangsung pada tahun 1950 hingga 1953. Warga menganggap bahwa pertemuan tersebut hanyalah perdamaian palsu dan warga juga khawatir Korea utara hanya akan memanfaatkan Korea selatan sebagai sumber uang (Suastha, 2018).

Pada pemerintahan Moon Jae-In, kursi Majelis Nasional pada tingkat legislatif didominasi oleh dua partai besar di Korea selatan, yaitu *Democratic Party of Korea (DPK)* yang memiliki aliran liberal, dan juga *Liberty of Korea Party (LKP)* dengan aliran Konservatif. Pada tahun 2018 Pemerintahan Demokrat Korea

selatan telah membuat rencana anggaran untuk proyek kerja sama antar Korea yang mencapai \$ 1 Miliar untuk tahun depan. Anggaran dana tersebut dikritik oleh Partai oposisi sebab belum ada rencana terperinci yang diserahkan pada Majelis Nasional. LKP menuntut transparansi rincian dana tersebut untuk memastikan pemerintahan Moon Jae-In tidak bermaksud untuk melanggar sanksi internasional Korea Utara. LKP memiliki kendali 112 kursi dari 299 anggota parlemen, sedangkan DPK memiliki 129 kursi. Meski jumlah kursi LKP jauh dari mayoritas, pemerintahan Moon Jae-In tetap membutuhkan dukungan dari oposisi agar mendapat persetujuan alokasi dana dari Majelis Nasional (Jae-Won, 2018).

The Policy of Peace and Prosperity merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk Mencapai perdamaian dalam upaya reunifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara. Kebijakan ini sebelumnya dikenal sebagai *Sunshine Policy* dan terus mengalami perkembangan. Meskipun sempat mengalami kemerosotan, nilai-nilai dari kebijakan ini masih mengalami perkembangan dan akan diaplikasikan kembali pada masa pemerintahan Moon Jae-In. Pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun, kebijakan ini gagal diterapkan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Kepercayaan Roh Moo-Hyun yang sangat tinggi terhadap Korea Utara pada masa itu membuat hubungan kedua negara menjadi timpang dan membuat Korea Selatan tidak mendapat keuntungan apapun. Belum lagi Korea Utara masih melakukan percobaan nuklirnya, dan mencoba mengeksploitasi Korea Selatan melalui *The Policy of Peace and Prosperity*. Pada Oktober 2006, Korea selatan akhirnya menanggukkan semua bantuan pasokan ke Korea Utara setelah uji coba nuklir dan rudal yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada akhir masa pemerintahan Roh Moo-

Hyun, kebijakan ini berakhir dan tidak dilanjutkan lagi oleh Pemerintahan selanjutnya, bersamaan dengan beralihnya pemerintahan beraliran liberal menjadi pemerintahan yang beraliran konservatif (Choong, 2005). Saat ini, setelah terjadi lagi pergesaran ideologi dari konservatif menjadi liberal, Moon Jae-In menerapkan kembali kebijakan tersebut, padahal sudah jelas bahwa kebijakan ini tidak efektif pada periode pemerintahan liberal sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *The Policy of Peace and Prosperity* diterapkan dalam upaya reunifikasi Korea selatan dan Korea utara pada periode 2017-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat Moon Jae-In menerapkan *The Policy of Peace and Prosperity* dalam upaya re-unifikasi.
- Untuk mengetahui tantangan apa saja yang di hadapi Moon Jae-In dalam proses penerapan *The Policy of Peace and Prosperity*

1.4 Signifikansi

Penelitian ini penting di lakukan mengingat Presiden Korea selatan yang terpilih pada tahun 2017 lalu merupakan Presiden dari partai beraliran liberal, yang mana Presiden dua periode sebelumnya merupakan dari partai konservatif. Perbedaan latar belakang Presiden Moon Jae-In dengan Presiden sebelumnya membuat para pendukung *The Policy of Peace and Prosperity* memiliki harapan

untuk diterapkannya lagi kebijakan tersebut, setelah pada akhir kepemimpinan Roh Moo-Hyun yang beraliran liberal kebijakan ini gagal dan tidak diteruskan oleh pemerintahan Lee Myung-Bak yang berasal dari partai konservatif. Belum ada penelitian yang menulis tentang kembali diterapkannya *The Policy of Peace and Prosperity* pada masa pemerintahan Moon Jae-In dengan sudut pandang tarik menarik kepentingan dua partai yang mendominasi Korea selatan saat ini, yaitu *Liberty of Korean Party* dan *Democratic Party of Korea*.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup tahun 2017 hingga 2018, mengingat pemerintahan Korea selatan mulai dijalankan oleh *Democratic Party of Korea* setelah Moon Jae-In memenangkan pemilu presiden pada tahun 2017. Akan ada membahas sedikit sejarah *The Policy of Peace and Prosperity* yang sebelumnya pernah gagal pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun, sebagai pemicu untuk menganalisa mengapa *The Policy of Peace and Prosperity* diterapkan kembali pada pemerintahan Moon Jae-In. Tulisan ini juga akan mencakup bagaimana kedua partai yang mendominasi kursi parlemen pada Majelis Nasional Korea selatan saling tarik-menarik kepentingan terkait kebijakan terhadap Korea utara sepanjang tahun 2017 hingga 2018. Penelitian ini tidak mencakup hingga tahun 2019 karena hingga akhir tahun 2019 kebijakan ini masih berjalan namun belum berjalan sepenuhnya sebab pembicaraan tentang kesepakatan sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika pada Korea utara masih belum menemukan jalan keluar atau solusi yang baik bagi keduanya.

1.6 Kajian Pustaka

Upaya re-unifikasi yang dilakukan Korea selatan dengan Korea utara telah berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga saat ini upaya tersebut belum juga menghasilkan sebuah kemajuan yang pesat. Menyatukan dua negara dengan dua pandangan politik yang berbeda memang bukanlah hal yang mudah dan bahkan hampir tidak memungkinkan. Namun untuk menghindari konflik bersenjata yang dapat menimbulkan kerugian, di setiap periode pemerintahan Negara Korea Selatan memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dengan Korea Utara. Pada setiap periode pemerintahan Korea Selatan memiliki metode yang berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh setiap pemerintahan masing-masing.

Dalam buku *'The Six Party Talks on North Korea'*, pada sub-bab yang berjudul *Moonshine on the Korean Peninsula* membahas mengenai peran Moon Jae-In sebagai Presiden baru Korea Selatan yang memiliki popularitas sangat baik di kalangan publik meskipun belum menunjukkan pemerintahan yang terstruktur. Setelah Presiden sebelumnya, Park Geun-Hye diturunkan oleh masyarakat karena skandal korupsi, masyarakat percaya bahwa Moon Jae-In memenuhi syarat untuk mengakhiri korupsi dan akan mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Karena dianggap mampu untuk menangani masalah domestik dengan baik dan mudah, dengan gayanya yang tidak otoritatif dan ramah, masyarakat beranggapan bahwa Moon Jae-In dapat menghadapi tantangan nuklir dari Pyongyang dengan menerapkan kembali *The Policy of Peace and Prosperity* yang dulu digunakan oleh

Presiden Roh Moo-Hyun dan Kim Dae-Jung untuk menjaga perdamaian dengan Korea Utara. (Hur, 2018)

Dalam sub bab yang berjudul '*The North Korea Nuclear Threat and South Korea's Deterrence Strategy*' yang di tulis oleh Chaesung Chun dalam buku *North Korea and Nuclear Weapons : Entering the New Era Deterrence* membahas mengenai strategi Korea Selatan pada masa pemerintahan Park Geun-Hye untuk mencegah ancaman nuklir dari Korea Utara. Dalam sub bab ini di jelaskan bahwa Korea Selatan menggabungkan ketangkasan dan pemberian sanksi untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antar kedua negara agar dapat merundingkan rekonsiliasi. Banyak kesulitan dalam melakukan strategi pencegahan tersebut karena kemajuan nuklir dan rudal Korea Utara berpengaruh pada aliansi Korea Selatan dan Amerika. Meski begitu, dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa kombinasi dari pencegahan dan hubungan baik sangat diperlukan dalam menekan ancaman nuklir dari Korea Utara (Chun, 2017).

Dalam sub bab yang berjudul *Park Geun-Hye and ROK Policy Towards DPRK* pada buku yang berjudul *The Evolving Military Balanca in the Korean Peninsula and Northeast Asia* yang ditulis oleh Anthony H.Cordesman dan Ashley Hess membahas tentang bagaimana Park Geun-Hye bersikap tegas terhadap DPRK atas percobaan nuklirnya. Dalam buku tersebut dijelaskan Park Geun-Hye menerapkan kebijakan Trust Politik yang mana kebijakan menenkankan pada proses pembangunan kepercayaan pada hubungan Inter-Korea. Park Geun-Hye juga akan membantu DPRK dengan bantuan ekonomi dan kemanusiaan, dengan syarat DPRK menghentikan kegiatan nuklirnya. Dalam tulisan tersebut juga

dijelaskan bagaimana Presiden Park Geun-Hye di awal pemerintahannya harus menghadapi konsekuensi ancaman nuklir dari Korea Utara pada pemerintahan sebelumnya yang mempersulit penerapan kebijakannya pada Korea Utara (Cordesman & Hess, 2013).

Dalam buku yang berjudul *De-bordering Korea : Tangible and Intangible legacies of Sunshine Policy* yang di tulis oleh Valerie Gelezeau, membahas tentang perkembangan hubungan antar Korea selatan dan Korea Utara pada masa *Sunshine Policy* yang memiliki peningkatan untuk bergabung kembali. Buku ini juga membahas mengenai bagaimana hubungan masyarakat di kedua negara, pembelot dari Korea Utara yang datang ke Korea Selatan sebagai masyarakat pengungsi, dan juga menjelaskan bagaimana wilayah perbatasan kedua negara sebagai cerminan dari hubungan antar kedua negara (Valerie Gelezeau, 2013).

Buku yang berjudul *South Korea at The Crossroads : Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers* yang di tulis oleh Scott A. Snyder menjabarkan tentang bagaimana pemimpin-pemimpin Korea Selatan menyeimbangkan kebutuhan aliansinya dengan negara-negara bersatu seperti China dan Amerika dalam disamping upaya persatuan dengan Korea Utara. Dijelaskan juga bagaimana faktor eksternal seperti persaingan yang kuat antar negara-negara bersatu dan perbedaan politik domestik antara konservatif dan progresif mempengaruhi kebijakan politik luar negrinya (Snyder, 2017).

Jurnal yang berjudul *Theorization of Kim Dae Jung's Pursuit of Inter-Korean Economic Exchange : Complex Independence Model* yang di tulis oleh Ki-Young Sung membahas tentang usaha-usaha Korea Selatan dalam menjalankan

kebijakannya, yaitu dengan mempromosikan perdagangan antar negara Korea di bawah permusuhan politik yang terjadi. Menjelaskan juga tentang bagaimana Kim Dae-Jung memperluas lingkup pertukaran dan diversifikasi aktor yang terlibat dalam hubungan antar negara Korea, yaitu aktor lembaga-lembaga sub-nasional. Dalam jurnal ini juga di jelaskan tentang kebijakan Kim Dae Jung yang berfokus pada keamanan ekonomi, dan penerapan interdependensi kompleks dalam menganalisis perubahan substansial (Sung, 2012).

Beberapa kajian pustaka di atas akan membantu penulis dalam menganalisis Penerapan *The Policy of Peace and Prosperity* dalam upaya re-unifikasi dengan Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae-In. Kajian pustaka di atas akan berfungsi sebagai referensi dan pembanding. Perbedaan tulisan ini terdapat pada bagaimana Moon Jae-In menerapkan kembali kebijakan *The policy of peace and prosperity* yang terus berkembang dari masa pemerintahan Kim Dae-Jung hingga sekarang, dan bagaimana Moon Jae-In menghadapi tantangan dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kebijakan tersebut terhadap upaya tercapainya perdamaian dengan Korea Utara. Pada kajian pustaka di atas belum ada yang menjelaskan secara mendalam bagaimana *The Policy of Peace and Prosperity* diterapkan pada masa pemerintahan Moon Jae-In. Adapun tulisan yang menjelaskan tentang bagaimana Korea Selatan mencegah ancaman nuklir dari Korea Utara pada masa Park Geun-Hye, namun belum ada penjelasan tentang hal tersebut di masa pemerintahan Moon Jae-In yang memiliki tindakan pencegahan yang berbeda. Adapun perbedaan tentang kerja sama ekonomi kedua Korea juga terdapat dalam salah satu buku diatas, dimana saat ini kedua Korea tidak bisa

melanjutkan kerja sama industri Kaesong mengingat sanksi yang diberikan PBB pada Korea Utara karena percobaan nuklirnya.

1.7 Landasan Teori/Konsep

Teori *Decision Making* merupakan sebuah pengaturan mengenai faktor apa yang membuat seorang Decision Maker membuat sebuah keputusan. Teori ini memiliki beberapa model untuk menentukan sebuah keputusan. Menurut Graham T Alison, ada tiga dasar pembagian dalam menentukan kebijakan luar negeri sebuah negara (Alison, 1971, hal. 693-709):.

1.7.1 Rational Actor Model

Model Aktor Rasional didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan mengkalkulasikan *cost and benefit* yang dihasilkan dari keputusan yang akan dibuat. model ini menekankan bahwa dalam membuat sebuah keputusan harus melewati tahapan-tahapan seperti penentuan tujuan yang matang, membuat pilihan alternatif lain, memperhitungkan konsekuensi, hingga sampai pada pilihan keputusan.

1.7.2 The Organizational Progress

Model Proses Organisasi mengacu pada *Standard Operating Procedures* yang sudah ada dan masih berlaku dalam sebuah organisasi. Model ini menekankan dalam pembuatan keputusan, harus melewati tahapan, prosedur dan mekanisme yang sudah ada dalam *Standard Operating Procedures* yang dimiliki. Output dari

organisasi yang telah dipertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritasnya akan disebut sebagai sebuah keputusan yang telah ditetapkan.

1.7.3 *Bureaucratic/Governmental Politic*

Dalam Model Politik Birokrasi pembuatan keputusan dirumuskan oleh berbagai pihak seperti aktor, kelompok, dan pihak yang terkait melalui proses tawar-menawar, kompromi, dan saling mempengaruhi antar pihak yang berkepentingan. Pembuatan keputusan akan menjadi proses yang panjang, dan akan melalui delebrasi politik yang kompleks.

Penelitian ini akan menggunakan salah satu dari tiga model tersebut, yaitu model *Bureaucratic Politic*. Model ini dipilih sebab cocok untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh aktor-aktor dalam pemerintahan Korea selatan guna menjalankan *The Policy of Peace and Prosperity* yang penuh dengan kompromi, dan tarik menarik kepentingan antar partai terutama dalam Majelis Nasional. Kedua model yang lain kurang tepat karena *Rational Choice* fokus pada *cost and benefit* yang rasional sedangkan dalam *The policy of peace and prosperity* banyak langkah irasional yang mempertaruhkan banyak resiko dan keuntungan yang tidak pasti. Sedangkan model *The Organizational Progress* kurang tepat sebab dalam penelitian ini penerapan kebijakan berdasarkan pada tarik menarik kepentingan, bukan melalui tahapan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam standar operasional prosedur yang sudah ada.

Model *Bereaucratic Politic* menggambarkan asumsi-asumsi dasar seperti apapun yang terjadi di lapangan adalah hasil dari resultan yang bukan dari

keputusan tunggal. Sebaliknya, tarik-menarik, kompromi dan mendorong secara terus menerus adalah komponen utama dalam politik. Mereka yang memiliki kekuatan lebih banyak akan menang dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Politik Birokrasi dapat digambarkan sebagai permainan tawar-menawar melalui berbagai saluran aktor-aktor yang telah diposisikan dalam lingkaran permainan didalamnya. Model Politik ini diusulkan untuk menjelaskan mengapa keputusan pemerintah tertentu dibuat, atau mengapa satu pola pemerintah muncul dengan mengidentifikasi permainan dan pemain, menampilkan koalisi, penuh dengan tawar-menawar dan kompromi, dan juga untuk menjelaskan suatu masalah yang membingungkan. Model ini memiliki beberapa pandangan konsep, yaitu (Alison, 1971, hal. 708-710) :

1. Posisi Menentukan Aksi

Dalam model ini posisi menentukan apa yang harus dilakukan oleh setiap aktor, karena kekurangan dan kelebihan setiap peran dalam permainan ini ditentukan dari posisi masing-masing aktor. Setiap aktor dalam permainan memiliki posisi dan peran yang aksinya akan mempengaruhi aktor lain. Karena dalam lingkaran birokrasi politik yang dapat mempengaruhi permasalahan bukan hanya kelemahan dan kekurangan setiap aktor, melainkan juga posisi aktor untuk satu sama lain. Dalam lingkaran birokrasi, posisi pemain dibagi menjadi empat perumpaan yaitu *Chief, staff, Indian, dan ad-hoc*.

2. Prioritas inti, Persepsi, dan Permasalahan

Untuk menentukan apa masalah yang harus diselesaikan dan bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan bergantung pada posisi dari sudut pandang

mana pertanyaan tersebut dipertimbangkan, karena prioritas dan persepsi masing-masing pemain memiliki perbedaan. Masing-masing pemain dalam sebuah permainan lingkaran birokrasi harus memahami orientasi dan tujuan yang akan didapatkan dalam permainan tersebut. Dengan demikian, pemain dapat memperoleh prediksi tentang sikap pemain lain, untuk kemudian membuat sebuah keputusan.

3. Kepentingan, Resiko, dan Kekuasaan

Dalam lingkaran birokrasi, Setiap pemain memiliki kepentingan berbeda, antara lain memenuhi kepentingan nasionalnya atau menjamin kesejahteraan aliansinya. Kepentingan yang tumpang tindih tersebut membuat permainan ini menjadi taruhan dengan resiko bagi setiap aktor. Kemampuan setiap aktor untuk sukses dalam permainan tersebut bergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Hal tersebut akan memenuhi tiga elemen penting yang dapat terpenuhi yaitu keuntungan tawar menawar, keterampilan dalam menggunakan keuntungan dari tawar menawar, dan persepsi dari aktor lain terhadap dua elemen penting sebelumnya. Maka dari itu, setiap aktor harus bisa mengendalikan permainan dan mampu memperhitungkan probabilitas keberhasilan yang masuk akal, meskipun cara-cara yang digunakan cenderung memiliki resiko yang besar karena tidak memiliki keputusan tunggal yang rasional.

4. Solusi permasalahan

Untuk mencapai solusi dari masalah yang terjadi, birokrasi politik tidak hanya fokus pada masalah inti saja, melainkan mencari solusi dengan melihat masalah dengan pandangan yang lebih luas. Hal ini membuat para pemain lebih

fokus pada apa yang harus diputuskan saat itu juga meski memiliki konsekuensi yang mengandung banyak resiko. Kesenjangan sering terjadi karena fokus pada masalah menjadi sangat luas.

5. *Action-Channels*

Permainan tawar-manwar diproses dengan *Action-channels*, yaitu cara-cara yang diatur untuk menghasilkan tindakan berdasarkan jenis masalah. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk menyusun permainan dengan memilih para aktor pemain utama, menentukan titik masuk setiap aktor ke dalam permainan, dan mendistribusikan keuntungan dan kerugian untuk setiap permainan. Hal ini dimaksudkan agar aktor yang tidak perlu terlibat dalam permainan tidak akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Kemudian setelah melihat aktor-aktor yang terlibat, dalam permainan ini dapat diidentifikasi siapa yang saling bersekongkol dan siapa yang saling berselisih.

6. Aksi sebagai Politik

Setiap pemain dalam lingkaran birokrasi politik ini memiliki cara dan persepsi sendiri dalam melihat suatu masalah. Politik dianggap sebagai mekanisme pilihan, bukan sebagai konteks kekuasaan bersama. Fitur-fitur masalah seperti ketidakpastian tentang apa yang harus dilakukan, keharusan bahwa sesuatu harus diselesaikan, dan konsekuensi penting dari hal-hal yang sudah dilakukan, membuat orang yang bertanggung jawab menjadi pemain aktif. Setiap pemain berusaha untuk memaksa pemain lain dan pemerintah untuk melihat fakta dari kacamata yang lebih luas, sesuai persepsi masing-masing pemain.

7. *Streams of outcomes*

Keputusan yang diambil oleh pemerintah merupakan kolase yang terdiri dari tindakan individu, hasil dari permainan tawar-menawar ditingkat kecil dan utama, dan juga kerumitan dalam masalah yang terjadi

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian untuk memahami dan mengeksplorasi suatu data atau kejadian, dengan menganalisis data yang sudah ada. Dari data tersebut, penulis membuat interpretasi untuk mendapatkan arti yang terdalam, kemudian di jabarkan lagi hingga mencapai kesimpulan. (Semiawan, 2010)

1.8.2 Subyek Penelitian

Subyek yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pemerintah Korea Selatan pada tahun 2017-2018, yang menghadapi pro-kontra terkait *The Policy of Peace and Prosperity* yang diterapkan kembali untuk upaya perdamaian dengan Korea Utara. Terjadinya tarik ulur dan tawar menawar antar kedua partai yang mendominasi pemerintahan yaitu LKP dan DPK akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data yang akan di ambil oleh penulis adalah menggunakan metode observasi kepustakaan pada dokumen, jurnal penelitian, berita, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. (sugiyono, 2009) Dokumen yang dimaksud adalah segala tulisan, maupun makalah yang memiliki

informasi tentang kebijakan *The policy of peace and prosperity* Korea Selatan terhadap Korea Utara untuk mencapai perdamaian dalam upaya re-unifikasi pada masa kepemimpinan Moon Jae-In.

1.8.4 Metode Analisis Data

Ada beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis data, yaitu pertama dengan mengumpulkan data tersebut, data yang valid dibutuhkan agar memiliki argumen yang kuat. Selanjutnya yaitu mempersiapkan data-data yang sudah terkumpul untuk dibaca kembali agar menemukan makna dari data-data tersebut. Lalu setelah itu melakukan *coding* yaitu mengkategorikan data-data yang sudah ada sesuai dengan kategori masing-masing data agar lebih mudah lagi dalam memahami data-data tersebut. Kemudian memberikan deskripsi dan analisis dari data yang telah dikategorikan tersebut agar lebih jelas lagi dan mudah untuk menganalisis lebih dalam. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis tersebut menjadi sebuah kesimpulan (Creswell, 2009).

BAB II

Peran Pemerintahan Korea selatan dalam menjalankan *The Policy of Peace and Prosperity* dan bentuk-bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut

2.1 Birokrasi Pemerintahan Korea Selatan

2.1.1 *Executive branch*

Menurut Konstitusi Korea Selatan yang di amandemen pada tahun 1987, anggota dalam *Executive branch* adalah Presiden, Perdana Menteri, Kementerian, dan Dewan Audit dan Inspeksi. Presiden secara langsung menjadi ketua dari Dewan Negara dan Perdana Menteri menjadi wakil ketua. Dewan Negara memiliki peran dan wewenang untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan Negara. Beberapa hal yang perlu untuk dirujuk pada Dewan Negara antara lain adalah :

- a. Kebijakan umum eksekutif
- b. Kebijakan luar negeri, perdamaian, dan perang
- c. Amandemen konstitusi, proposal referendum nasional, dan usulan perjanjian dan keputusan dari Presiden
- d. Rancangan anggaran dasar yang mempengaruhi finansial negara

Dalam hal yang berkaitan dengan diplomasi, pertahanan nasional, dan penyatuan yang berkaitan dengan referendum nasional Presiden memiliki hak untuk mengajukan kebijakan penting yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Dalam kabinet pemerintahannya, Moon Jae-In memilih Cho Myung-Gon sebagai Menteri Unifikasi. Cho Myung-Gon pernah menjabat sebagai Direktur untuk bisnis industri Kaesong selama kurang lebih dua tahun. dan kemudian menjabat sebagai sekretaris staf kepresidenan pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun. Cho Myung-Gon merupakan peran kunci KTT antar Korea pada tahun 2007 di masa pemerintahan Roh Moo-Hyun. Dengan ditunjuknya Cho Myung-Gon sebagai Menteri Unifikasi, hal ini mengaskan bahwa Moon Jae-In memiliki fokus yang besar pada penguatan hubungan dengan Korea Utara. Moon Jae-In dengan pandangan politik liberalnya berusaha untuk mengubah pendekatan luar negeri dengan Korea Utara demi mencapai perdamaian. Moon Jae-In memilih Menteri luar negeri yang akan menangani kebijakan terhadap Korea Utara dengan harapan diplomasi dapat dicapai dengan dialog dan diskusi. Moon Jae-In menunjuk Kang Kyung-Hwa sebagai menteri luar negeri Korea Selatan. Kang Kyung-Hwa merupakan diplomat cerdas dengan berbagai prestasi baik. dalam penyelesaian masalah diplomatik, Kang Kyung-Hwan sangat ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sensitif baik dalam negeri maupun secara global. (Kim J. , 2017)

Dalam menghadapi masalah denuklirisasi Korea Utara untuk mencapai perdamaian kedua Korea, Kang Kyung-Hwan memiliki pandangan politik yang tidak jauh berbeda dari Moon Jae-In. Menurut Kang, permasalahan inti dari denuklirisasi adalah hubungan Amerika-Korea Utara, yang apabila Amerika memiliki kepercayaan penuh pada Korea Utara yang mulai melucuti percobaan nuklirnya maka denuklirisasi akan segera tercapai. (John, 2018)

Pada Intinya, Dewan Negara yang telah dibentuk oleh Moon Jae-In sangat disesuaikan dengan kepentingan dan arah politik Moon Jae-In, salah satunya adalah tercapainya perdamaian dan kerja sama dengan Korea Utara.

2.1.2 *Legislative Branch*

Menurut Konstitusi Korea Selatan tahun 1987 pasal 60 ayat 1, Majelis Nasional memiliki hak untuk menyetujui ratifikasi perjanjian yang berkaitan dengan bantuan timbal balik atau keamanan bersama, perjanjian internasional dalam hal persahabatan, perdagangan, dan navigasi, perjanjian yang berkaitan dengan pandangan dan navigasi, perjanjian tentang pembatasan dan kedaulatan, perjanjian damai, perjanjian yang akan membebani finansial Negara atau perjanjian yang berkaitan dengan masalah legislatif. Majelis Nasional dapat mendukung atau membatasi kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dengan otoritas hukum atau memanfaatkan opini publik. Untuk kesepakatan yang berkaitan dengan perdagangan, hubungan antar-Korea, hubungan Korea Selatan-Jepang, dan aliansi Korea Selatan-Amerika Majelis Nasional memiliki hak untuk meminta pendapat publik secara langsung untuk menekan eksekutif.

Setelah terjadi transisi pemerintahan, Majelis Nasional menjadi forum dimana setiap anggota parlemen dapat membela atau mengkritik arah kebijakan luar negeri yang baru. Tidak ada peran eksekutif didalamnya karena forum tersebut lebih mengarah pada bentrok antara partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi. Namun, tahun pertama pemerintahan baru di Korea Selatan umumnya adalah tahun

yang damai, karena publik cenderung menyetujui kebijakan pemerintahan yang baru. (Jung, 1996)

Dalam penerapan sebuah kebijakan luar negeri, Majelis Nasional memiliki peran untuk mengawasi proses negosiasi kebijakan atau perjanjian yang akan dibuat. Dalam tahap ini, Majelis Nasional dapat menekan eksekutif dengan mempengaruhi opini publik, mengadakan dengan pendapat, dan menuntut pengarahannya dari pejabat pemerintah. Majelis Nasional juga dapat menekan eksekutif dengan membuat resolusi yang merekomendasikan perubahan apabila kebijakan yang dibuat tidak berhasil memenuhi kepentingan nasional.

Pengaruh Majelis Nasional sangat kuat ketika sebuah kebijakan telah mencapai tahap ratifikasi. Sebelum undang-undang Majelis Nasional mengalami revisi pada tahun 2012, pemerintah dapat meloloskan kebijakan dengan mudah bersama dengan partai yang berkuasa. Setelah revisi tersebut, Majelis Nasional memiliki kekuatan terutama persetujuan dari oposisi. Oleh karena itu, saat ini konflik antara eksekutif dan Majelis Nasional mudah terjadi, apabila partai yang berkuasa belum membuat koalisi dengan partai oposisi. Undang-undang Majelis Nasional 2012 yang telah direvisi membuat proses ratifikasi perjanjian internasional menjadi rumit. Badan eksekutif harus berkoordinasi dari awal hingga akhir dengan Majelis Nasional dalam menentukan kebijakan, terutama tentang perdagangan dan proses reunifikasi Semenanjung Korea (Lee, 2018).

Meskipun partai-partai di Korea Selatan mengubah nama dan pemimpin, selalu ada dua partai besar yang mendominasi dengan dua ideologi yang

berlawanan. Dan saat ini kursi Majelis Nasional didominasi oleh dua partai besar yaitu Democratic Korean Party (DPK) dengan ideologi liberal dan Liberty of Korean Party yang memiliki ideologi konservatif. Secara garis besar, kaum liberal menganggap bahwa Korea Utara merupakan negara kerabat sedangkan kaum konservatif menganggap Korea Utara merupakan rezim yang mengancam. Berikut ini merupakan tabel komposisi partai yang menduduki kursi parlemen pada Majelis Nasional.

Tabel 1. (The National Assembly of The Republic of Korea, 2019)

PARTAI	Daerah	Representasi	Proportion	
	Pemilihan	Proporsional	Total	(%)
Democratic Party of Korea	116	13	129	43,73%
Liberty Korea Party	91	17	108	36,61%
Bareunmirae Party	15	13	28	9,49%
Justice Party	2	4	6	2,03%
Party for Democracy and Peace	4	0	4	1,36%
Our Republican Party	2	0	2	0,68%
The Minjung Party	1	0	1	0,34%
Anggota tanpa Afiliasi Partai	17	0	17	5,76%
Total	248	47	295	100%

Sebagai Partai yang menduduki kursi parlemen paling banyak dalam Majelis Nasional, *Democratic Party of Korea* (DPK) atau disebut juga sebagai *The*

Minjoo Party memiliki pengaruh yang paling kuat dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Moon Jae-In. Partai yang pernah dipimpin oleh Moon Jae-In pada tahun 2012 tersebut telah melalui banyak perubahan sejak dibentuk oleh Kim Dae-Jung pada tahun 1997. Namun DPK masih berpacu pada mengedepankan HAM, membangun kembali hubungan yang baik dengan Korea Utara, dan kebijakan ekonomi lebih maju yang disebut sebagai *Progressivisme* baru. Terkait dengan kebijakan terhadap Korea Utara, DPK mendukung perdamaian di kawasan semenanjung Korea dengan terus memperkuat basis komunitas antar-Korea untuk proses re-unifikasi, terus melakukan kerja sama internasional, dan memperluas dukungan HAM dan kesejahteraan rakyat kedua Korea dengan cara damai dan memperkuat diplomasi unifikasi dengan terus mengusahakan dukungan dari negara-negara tetangga dan aliansi yang terkait, demi mendukung terciptanya perdamaian. (The Minjoo Party, 2019)

Dalam hal kebijakan politik, DPK memiliki fokus terhadap pemulihan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sempat hilang setelah skandal politik Park Geun-Hye pada 2016 lalu dengan menerapkan sistem politik yang lebih bersimpati pada rakyat, dan memperluas elemen-elemen demokrasi partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang berpusat pada rakyat, mengingat opini publik juga sangat penting bagi pemerintahan Korea Selatan. . (The Minjoo Party, 2019) Opini publik memiliki pengaruh penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri di Korea Selatan, karena kebanyakan masyarakat Korea Selatan hanya mengikuti elite politik yang didukungnya dan cenderung tidak memahami kondisi hubungan luar negeri Korea Selatan dengan negara lain. Keberhasilan kebijakan

luar negeri Korea Selatan memiliki ketergantungan terhadap dukungan dan kepercayaan publik pada Presiden atau elite politik tertentu (Kim J. , 2018).

Melihat bagaimana seberapa besar partai yang mendukung Moon Jae-In menguasai sebagian besar kursi parlemen, menandakan bahwa parlemen juga akan condong pada arah kebijakan politik Moon Jae-In.

2.1.4 Kepemimpinan Moon Jae-In

Pada Mei 2017, Moon Jae-In berhasil memenangkan Pemilu dan resmi menjadi Presiden Korea Selatan. Setelah hampir satu abad Korea Selatan dipimpin oleh dua Presiden yang memiliki ideologi konservatif, kini Korea Selatan memiliki Presiden baru yang menganut ideologi progresif dan masyarakat tentunya mengharapkan perubahan yang lebih baik. (Kwon, 2017) Birokrasi politik dan pemerintahan Korea Selatan memiliki berbagai variasi pada setiap periode kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan setiap Presiden memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadaan domestik politik dan pemerintahan. Tidak seperti Park Geun-Hye yang memiliki latar belakang politik yang kuat, Moon Jae-In memiliki latar belakang yang lebih kuat terhadap masyarakat sipil. Statusnya sebagai imigran dari Korea Utara membuat Moon Jae-In memiliki pandangan yang kuat terhadap unifikasi antar Korea. Pandangan tersebut juga diperkuat dengan profesi terdahulunya yang merupakan seorang pengacara HAM dan merintis karir politiknya sebagai penasihat mantan Presiden Roh Moo-Hyun. (bbc, 2018)

Moon Jae-In sangat menjunjung tinggi perdamaian dan melakukan pendekatan secara persuasif dan konsisten terhadap Korea Utara (Park, 2017). Hal tersebut dapat dilihat melalui kebijakan yang telah Moon Jae-In buat dalam upaya re-unifikasi dengan Korea Utara. Kebijakan tersebut adalah : 1) *Peace First*, adalah nilai yang harus di junjung tinggi dengan prioritas tertinggi, serta sebagai landasan untuk kemakmuran rakyat. 2) *Spirit of Mutual Respect* untuk mencapai kemakmuran bersama bagi semenanjung Korea, dimana Selatan dan Utara menghormati dan bekerja sama satu sama lain dengan menerapkan 3-*No's* – Tidak ada keinginan untuk meruntuhkan Korea Utara, tidak ada aktivitas penyatuan dengan pemaksaan, dan tidak ada aktivitas penyatuan melalui sarana buatan dan ilegal. 3) *Open Policy*, Kebijakan akan di buat melalui partisipasi dan interaksi publik untuk memastikan bahwa kebijakan dapat sepenuhnya dipahami dan dibuat oleh rakyat (Ministry of Unification, 2013).

Dalam pidatonya pada saat menghadiri konferensi tingkat tinggi di Berlin, Moon Jae-In menjabarkan visinya untuk mewujudkan perdamaian di semenanjung Korea (Frank, 2017). Presiden Moon Jae-In menyebutkan lima kebijakan yang akan dilakukan terhadap Korea Utara, yaitu menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, denuklirisasi Korea Utara yang menjamin keamanan rezim Korea Utara, Membentuk sistem perdamaian yang abadi, melakukan perencanaan proyek ekonomi baru di Semenanjung Korea, dan yang terakhir adalah proyek pertukaran non-politik. Selain itu, Presiden Moon Jae-In juga menyampaikan langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk menciptakan perdamaian, dimulai dengan yang termudah, yaitu mengadakan reuni keluarga bagi warga Korea Utara dan Korea

Selatan. Kemudian yang kedua mengikutsertakan Korea Utara untuk ikut dalam ajang olahraga Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang. Tahap selanjutnya adalah langkah yang lebih serius yaitu penghentian aksi permusuhan di area garis demarkasi militer, dan yang terakhir adalah mengadakan pembicaraan antar kedua negara Korea termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Inter Korea. (Bae, 2017)

Moon Jae-In memulai masa kepemimpinannya dengan menghadapi ketegangan konflik penyebaran THAAD oleh Amerika yang membuat hubungan Korea Selatan dan China memburuk. Konflik ini tentu berdampak negatif pada koordinasi untuk menekan denuklirisasi Korea Utara. Melalui kasus tersebut, Moon Jae-In menunjukkan sikap persuasif dan lebih kooperatif terhadap China untuk mencapai kesepakatan damai. Dan meskipun kesepakatan perbaikan hubungan telah dicapai, pencapaian Moon Jae-In tersebut belum cukup untuk menilai pemerintahan pada masa kepemimpinannya akan menjadi lebih baik atau memiliki pola politik yang sama. (Taylor, 2017) Melihat dari sikap Moon Jae-In tersebut, dapat disimpulkan bahwa Moon Jae-In akan memiliki pemerintahan lebih terbuka dan mengutamakan diplomasi, terutama dalam kebijakan luar negeri terhadap hubungan dengan Korea Utara.

Selama hampir satu abad pemerintahan Korea Selatan dipimpin oleh presiden dari kalangan konservatif, hubungan antar kedua Korea telah diputus untuk menekan Korea Utara melakukan denuklirisasi. Kalangan liberal Korea Selatan saat ini percaya bahwa dasar untuk membangun perdamaian di semenanjung Korea adalah dengan kerja sama dan mempertahankan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara untuk mencapai perdamaian.

2.2 Penerapan *The Policy of Peace and Prosperity*

2.2.1 Langkah-langkah Moon Jae-In dalam menerapkan kembali *The Policy of Peace and Prosperity*

The Policy of Peace and Prosperity merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan dalam upaya menciptakan perdamaian di semenanjung Korea. Kebijakan tersebut dicetuskan pertama pada masa pemerintahan Kim Dae-Jung dengan nama *Sunshine Policy*. Meskipun sempat mengalami kemerosotan pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun hingga dianggap gagal, nilai-nilai dari kebijakan ini masih mengalami perkembangan dan diterapkan kembali pada masa pemerintahan Moon Jae-In.

Langkah awal yang dilakukan Moon Jae-In agar kebijakannya berjalan adalah membangun hubungan persahabatan dengan Korea Utara melalui olimpiade Pyeongchang yang diadakan pada musim dingin tahun 2018. Kementerian Reunifikasi mengungkapkan bahwa Korea Utara dapat berpartisipasi dalam olimpiade tersebut, dan bersama undangan terbuka tersebut Kementerian mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Panmunjeom untuk membahas partisipasi Korea Utara dalam olimpiade. Pertemuan antara Cho Myung-Gyun selaku menteri unifikasi Korea Selatan dengan Ri Son-Gwon selaku kepala delegasi Korea Utara tersebut akhirnya terjadi dan menghasilkan kesepakatan kerja sama berupa tim gabungan hoki putri dan penggunaan bendera kesatuan dalam pembukaan olimpiade. Selain itu, pertemuan pertama tersebut menghasilkan sebuah *hotline* yang dibentuk di area Panmunjeom

dan digunakan khusus untuk mempertemukan kedua kepala negara. (McCurry, 2018)

Pada April 2018, untuk pertama kali dalam sejarah pemimpin Korea Utara melewati wilayah demiliterisasi memasuki wilayah Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan *Inter-Korean Summit*. pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan berupa Deklarasi Panmunjeom yang mana poin-poinnya bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara, dan menjadikan wilayah semenanjung Korea sebagai wilayah damai dan bebas dari perang. (Kim C. , 2018)

Kemudian pada September 2018, Moon Jae-In kembali mengadakan Pertemuan *Inter-Korean Summit* dengan Pimpinan Korea Utara, Kim Jong-Un, di Pyeongyang untuk ketiga kalinya. Keduanya sepakat bahwa adopsi deklarasi Panmunjeom yang sebelumnya sudah dibentuk menghasilkan banyak hal positif seperti komunikasi yang intens antar kedua Korea, dan langkah-langkah penting untuk meredakan ketegangan militer. Dalam KTT tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperluas penghentian permusuhan terutama di area-area konfrontasi pada wilayah semenanjung Korea, terus-menerus memajukan pertukaran kerja sama, melakukan reunifikasi keluarga yang terpisah, dan sepakat untuk menjadikan wilayah semenanjung Korea sepenuhnya menjadi wilayah damai yang bebas senjata nuklir. Korea Utara juga menawarkan akan membongkar uji coba rudal yang ada di Dongchang-ri dan juga akan melakukan pembongkaran permanen fasilitas nuklir yang ada di Yeongbyeon. (Pyongyang Declaration, 2018)

Tujuan lain Moon Jae-In juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi, yang mana apabila kerja sama antar Korea dapat terjalin dengan lancar peta ekonomi

Semenanjung Korea yang baru akan terbentuk, zona industri bersama dan jaringan transportasi akan terbangun dengan membuka kembali industri Kaesong dan pariwisata di gunung Kumkang utara untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di Asia Timur (Choe, 2018).

2.2.2 Deklarasi Panmunjom

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintahan Moon Jae-In untuk mencapai tujuan perdamaian dan kerja sama ekonomi dengan Korea Utara adalah mengadakan KTT inter-Korea, yang kemudian hasil pertemuan tersebut disahkan dalam bentuk deklarasi Panmunjom. Pertemuan inter-Korea yang terjadi tersebut merupakan pertemuan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya dilakukan pertama kali pada tahun 1998 oleh Kim Dae-Jung dan pada tahun 2007 oleh Roh Moo-Hyun. (Santi, 2018) Isi dari *Panmunjom Declaration of Peace, Prosperity, and Unification* yang ditandatangani pada april 2018 di Panmunjom tersebut tidak lepas dari perjanjian damai di semenanjung Korea dan proses denuklirisasi Korea Utara. Kim Jong-Un dan Moon Jae-In sepakat untuk memperbaiki hubungan kedua negara dengan terus aktif menanamkan komitmen hubungan kedua Negara untuk memasuki era baru (Sofwan, 2018).

Dalam deklarasi ini, Kim dan Moon berbagi komitmen tegas untuk mengakhiri segala perpecahan dan konfrontasi yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953. Perang itu memang diakhiri dengan gencatan senjata tanpa kesepakatan damai antara kedua negara. poin-poin penting dalam Deklarasi Panmunjom (Yonhap, 2018), antara lain :

- Menyetujui adanya negosiasi pada berbagai bidang dan aktif melaksanakan kesepakatan yang disetujui dalam KTT.
- Membangun kantor penghubung bersama di wilayah Gaesong untuk fasilitas konsultasi dan memperlancar pertukaran kerja sama antar masyarakat.
- Mengadakan reuni keluarga untuk mempertemukan keluarga yang terpisah.
- Melanjutkan secara aktif proyek yang pernah disepakati pada deklarasi tahun 2007
- Mengurangi ketegangan militer antar negara, terutama di wilayah sememnanjung Korea.
- Menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul akibat perpecahan kedua Negara.
- Menghentikan segala bentuk tindakan bermusuhan di setiap wilayah termasuk darat, laut, serta udara yang merupakan sumber utama ketegangan konflik militer.
- Menjadikan zona demiliterisasi sebagai zona damai, dan ditetapkan mulai 1 Mei 2018.
- Melakukan pertemuan intens antara otoritas militer kedua Korea termasuk antar menteri pertahanan.
- Melakukan perlucutan senjata secara bertahap untuk membangun kepercayaan militer.

-Mengadakan pertemuan trilateral antara Korea Selatan, Korea Utara, dan Amerika Serikat atau pertemuan segiempat yang melibatkan China, dengan tujuan untuk mengakhiri konflik dan membangun rezim perdamaian yang solid.

-Menyepakati untuk secara rutin mengadakan pertemuan dan melakukan percakapan via telepon antar kedua pemimpin Korea untuk memperkuat kepercayaan dan membangun progres unifikasi di Semenanjung Korea.

2.2.3 Langkah Internasional

Tidak hanya fokus pada hubungan dengan Korea Utara saja, Moon Jae-In juga memperkuat hubungan dengan negara sekutu Korea Selatan, yaitu Amerika Serikat. Menjaga hubungan dengan Amerika merupakan hal yang sangat penting, mengingat Moon Jae-In menjadikan hubungan Korea Selatan dengan Amerika sebagai dasar dari perdamaian dengan Korea Utara. Selain Amerika, Moon Jae-In juga berusaha lebih mendekatkan diri dan memperbaiki hubungan dengan China selepas sengketa THAAD yang membuat China memboikot kerja sama ekonominya dengan Korea Selatan. Memiliki hubungan yang baik dengan sekutu Korea Utara juga akan mempengaruhi proses perdamaian yang akan Korea Selatan capai dengan Korea Utara. (Taylor, 2017)

Demi mencapai perdamaian dengan Korea Utara agar dapat menjalankan kerja sama ekonomi dan meningkatkan perekonomian kedua Korea, Moon Jae-In dihadapkan pada aliansi Korea Selatan sendiri, yaitu Amerika yang tidak mendukung sepenuhnya langkah-langkah dialog yang diterapkan Moon Jae-In kepada Korea Utara. Kedua negara yang telah memiliki hubungan sekutu selama

67 tahun ini saat ini dipimpin oleh kedua pemimpin yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda. Hal ini menimbulkan dua pandangan yang berbeda terkait Korea Utara, dan membuat keduanya memiliki pergesekan hubungan yang tidak baik. Trump menganggap Korea Selatan terlalu tenang dalam menghadapi Korea Utara dan menganggap berunding dengan Korea Utara bukan sebuah solusi. Trump menganggap Moon Jae-In bisa saja mengulang kesalahan Roh Moo-Hyun yang mengeluarkan *statement* anti-Amerika, dan kemudian berakhir dimanfaatkan oleh Korea Utara dan membuat hubungan kedua Korea menjadi timpang. (Sang-Hun, 2017)

Moon Jae-In semakin dihadapkan pada dilema demi mencapai perdamaian dengan Korea Utara, dan juga mempertahankan hubungan dengan aliansi yang sudah lama terbentuk dengan Amerika. Moon Jae-In menghadapi dilema yang tidak berkesudahan, karena Jepang, Negara yang secara geografis dekat dengan kedua Korea, juga mendukung Amerika tetap menjatuhkan sanksi untuk menekan Korea Utara. Ditambah lagi, hubungan Korea Selatan dan Jepang yang sedang renggang karena sengketa militer atas persinggungan antara kapal perang Korea Selatan dan pesawat patroli maritim Jepang. Konflik ini tentu mengganggu koordinasi dari dua negara untuk menyelesaikan masalah di semenanjung Korea. (Berlinger, 2019)

Disamping menghadapi dilema menghadapi negara aliansinya, Moon Jae-In juga berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain yang juga memiliki pengaruh dan kepentingan dalam menyelesaikan konflik dengan Korea Utara, yaitu China dan Rusia. Moon Jae-In mencoba lebih terbuka terhadap China dan berhasil menyelesaikan konflik THAAD yang sebelumnya memanas

pada masa pemerintahan Park Geun-Hye. Meskipun belum sepenuhnya selesai, Korea Selatan dan China sepakat untuk berdamai. (McGuire, 2018) Begitupun dengan Rusia, Vladimir Putin, selaku Presiden Rusia memiliki pemikiran yang sama dengan Moon Jae-In. Menurut Presiden Rusia tersebut, menekan Korea Utara dengan sanksi tidak akan menyelesaikan masalah. Pendekatan secara persuasif akan membantu melunakan Korea Utara dan membuat negara tersebut perlahan melucuti persenjataan nuklirnya. Rusia mungkin bukan pendukung utama Korea Utara, namun negara ini memiliki pengaruh mengingat Korea Utara bergantung pada Rusia sebagai sumber uang. Bertemunya Kim Jong-Un dengan Vladimir Putin yang bertujuan untuk meminta keamanan nasional bagi Korea Utara sebelum menyerahkan nuklirnya menjadi salah satu bukti bahwa Rusia memiliki pengaruh pada perdamaian kedua Korea. (Chance, 2019)

2.3 Bentuk Ketidaksetujuan terhadap *The Policy of Peace and Prosperity*

The Policy of Peace and Prosperity yang diterapkan kembali oleh Moon Jae-In telah memberi harapan baru bagi kedua Korea untuk mencapai perdamaian. Namun disisi lain, kebijakan tersebut juga menimbulkan dilema tentang hubungan aliansi Korea Selatan dan Amerika, mengingat kebijakan ini pernah gagal pada pemerintahan Roh Moo-Hyun karena cenderung lebih menguntungkan Korea Utara dan menyebabkan kerugian besar bagi Korea Selatan. belum lagi, adanya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh oposisi melalui Majelis Nasional karena perbedaan ideologi yang dianut oleh oposisi terbesar yaitu LKP, dan juga Opini

Publik yang terbagi menjadi pro dan kontra yang menimbulkan gerakan-gerakan penolakan yang masih berhubungan dengan ideologi dan juga pengaruh dari luka perang Korea 50 tahun silam yang masih membekas dibenak generasi individu berusia lanjut.

Perbedaan ideologi kedua partai yang kini mendominasi pemerintahan Korea Selatan merupakan masalah utama negara tersebut dalam menentukan kebijakan luar negerinya, terutama terhadap Korea Utara. Kedua partai yang kini mendominasi pemerintahan Korea Selatan memiliki kepentingan tersendiri terkait ideologi politik masing-masing. LKP yang lebih memilih mengurus masalah dalam negeri dan menganggap menetapkan sanksi merupakan cara terbaik untuk menekan nuklir Korea Utara, dan DKP yang mengutamakan kerja sama dan perdamaian untuk dapat meningkatkan ekonomi yang baik di kawasan Asia Timur dan menjadikan Semenanjung Korea kawasan yang damai. Berikut merupakan bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh partai oposisi dan gerakan yang dilakukan oleh publik.

2.3.1 Ketidaksetujuan Ratifikasi Perjanjian Pyongyang dan Deklarasi Panmunjom

Hubungan antar-Korea saat ini semakin membaik, Moon Jae-In bahkan akan melakukan ratifikasi Perjanjian Pyongyang dengan Kim Jong-Un yang berisi tentang rencana untuk implementasi langkah-langkah pengendalian senjata dan pembangunan proyek infrastruktur antar-Korea. LKP menentang ratifikasi tersebut. Penolakan tersebut terjadi karena belum adanya rincian yang jelas mengenai denuklirisasi Korea Utara. Selain itu, LKP menganggap Moon Jae-In telah melanggar konstitusi karena tidak meminta persetujuan dari parlemen dalam

meratifikasi kesepakatan yang dianggap berbahaya oleh LKP. LKP juga menganggap bahwa perjanjian tersebut akan mengancam keamanan nasional Korea Selatan.

Namun, klaim LKP yang menyatakan bahwa Moon Jae-In melanggar konstitusi ditegaskan oleh kantor kepresidenan bahwa hal itu tidak benar. Sebab, menurut Undang-Undang tahun 2005 yang mengatur hubungan antar Korea, yang menyatakan bahwa hubungan antar kedua Korea bukan hubungan antar dua Negara berdaulat apabila bersinggungan dengan langkah-langkah untuk penyatuan kedua Korea kembali. Oleh sebab itu, perjanjian pyongyang yang dilakukan Moon Jae-In tidak bisa disebut sebagai Perjanjian Internasional, karena perjanjian tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan antar Korea dan tidak membebani keuangan negara. Menurut Undang-undang tersebut, hanya ada dua kasus yang memerlukan persetujuan parlemen yaitu ketika sebuah perjanjian membebani keuangan Negara dan pembuatan Undang-undang Negara. Oleh sebab itu meski perjanjian telah dibuat, Moon Jae-In tetap membutuhkan ratifikasi dari parlemen untuk menyetujui Ratifikasi Deklarasi Panmunjom yang mana merupakan langkah lanjutan dari Deklarasi Pyongyang yang memiliki beban keuangan yang signifikan dan sudah termasuk perjanjian internasional. Perjanjian Pyongyang tidak menimbulkan beban keuangan sebab sebagian isi dari perjanjian tersebut hanya dapat diimplementasikan dalam Deklarasi Panmunjom (Yeo, 2018).

2.3.2 Skeptisisme Publik

Setelah Moon Jae-In melakukan pertemuan KTT dengan Kim Jong-Un pada April 2018, peringkat dukungan kepada Moon meningkat hingga 83%. Hingga hampir beberapa bulan setelah itu, survei Gallup Korea menunjukkan bahwa dukungan tersebut turun hingga mencapai angka 49%. Survei tersebut menunjukkan bahwa warga Korea Selatan mulai skeptis pada kebijakan Moon terhadap Korea Utara. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu, sebagian menganggap bahwa diplomasi nuklir antara Amerika dan Korea Utara akan menemui kebuntuan. Setelah berjalan selama hampir satu tahun, Masyarakat mulai belajar bahwa Korea Utara tidak akan melucuti nuklirnya dengan mudah. karena bagaimanapun, terpilihnya Moon Jae-In pada pemilu 2017 dibayang-bayangi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan konservatif Park Geun-Hye yang berakhir karena skandal korupsi. Pertumbuhan ekonomi yang lesu dan melonjaknya harga real-estate juga harus menjadi *concern* utama Moon Jae-In, karena apabila Moon tidak bisa mengatasi masalah ekonomi, dukungan masyarakat terhadap kebijakan Moon akan semakin menurun karena masyarakat akan cenderung fokus pada masalah ekonomi domestik (Kim H.-J. , 2018).

Mobilisasi kebijakan anti-komunisme dan industrialisasi yang terjadi dari dulu hingga sekarang sangat mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat Korea Selatan, termasuk media. Ketika mengalami transisi menuju negara demokrasi, Korea Selatan memiliki dua pandangan yang berbeda mengenai demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, media konservatif cenderung mengambil peran sebagai pejuang ideologis mereka sendiri dan melawan lawan ideologis lainnya. Dalam membahas keanekaragaman, media konservatif hanya membahas konteks yang

dapat melindungi status sosial ekonomi, misalnya media konservatif memiliki pandangan demokrasi liberal yang berorientasi pasar, sedangkan media progresif mengedepankan prospek demokrasi partisipatif. Meskipun sama-sama menganut sistem demokrasi, kedua media memiliki pandangan dari arah yang berbeda. Dalam meliput sebuah berita yang berisi tentang perdebatan dua pandangan politik yang berbeda, surat kabar utama berfungsi sebagai ruang publik dalam memediasi isu-isu kontroversial. Meskipun media menjalankan peran liberalis dan partisipatif untuk menjalankan proses demokratisasi, secara tidak langsung media juga menyediakan ruang konflik, advokat di ruang publik yang menciptakan pendapat yang bulat dari pihak-pihak yang bertikai. Media di Korea tidak hanya memediasi opini elit politik dan menyampaikan kepentingan kelompok namun ada juga pengorganisir pendapat elit dan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu sulit untuk mempercayai pernyataan yang dibuat oleh media konservatif yang menyatakan bahwa mereka adalah lembaga demokrasi liberal yang representatif atau media progresif yang menganggap bahwa mereka berperan sebagai lembaga demokrasi partisipatif. Namun anehnya, pandangan demokratis masyarakat Korea Selatan mengikuti apa yang disampaikan media Korea. Sebagian besar proses demokratisasi Korea berdasarkan pada cara media memediasi opini publik dan menyalurkan kepentingan sosial yang berfungsi sebagai ruang publik. (Rhee June-Woong, 2011)

2.3.4 Taegukgi Rallies

Gerakan protes ini merupakan bentuk penolakan terhadap unifikasi kedua Korea. Anggota dari kelompok Taegu-gi Rallies merupakan pendukung Park Geun Hye, yang mana sebagian besar memiliki peran pada masa pembangunan ekonomi Korea Selatan pada masa kepemimpinan ayahnya, yaitu Park Chung-Hee. Para demonstran dalam kelompok ini tidak mendukung Park Geun-Hye dengan motif politik apapun, melainkan kelompok ini yakin bahwa kembali pada penerapan sistem pemerintahan seperti yang lalu akan membuat negara menjadi lebih baik. Keyakinan ini terbentuk demi menunjukkan rasa patriotisme yang terbentuk dari masa lalu, terutama masa dimana Park Chung-Hee menerapkan gerakan pemberantasan komunisme. (Moon S.-H. , 2018)

Gerakan protes yang dilakukan setiap minggu ini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, dan diatur oleh Partai Patriotisme Korea. Aksi yang dilakukan selalu berlangsung secara damai. Ada tiga tuntutan utama yang ingin dicapai dalam gerakan ini, yaitu pelestarian demokrasi liberal dan ekonomi pasar Korea Selatan, penurukan rezim Moon Jae-In dan menyelamatkan Park Geun-Hye, dan menciptakan kawasan Semenanjung Korea yang benar-benar bebas dan demokratis, sekaligus pembebasan 25 juta warga Korea Utara di bawah kediktatoran otoriter Kim Jong-Un. (Kennedy, 2019)

BAB III

Analisis *Bureaucratic Politics* terhadap *The Policy of Peace and Prosperity* pada masa pemerintahan Moon Jae-In

Berdasarkan pada pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan *Peace and Prosperity* untuk mengatur hubungan luar negeri dengan Korea Utara, penulis akan membagi analisis dalam bab ini dengan mengacu pada poin-poin dari teori birokrasi politik:

3.1 Posisi menentukan aksi

Dalam lingkaran birokrasi politik pemerintah Korea Selatan, aktor-aktor yang terlibat memiliki posisi masing-masing dalam menentukan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara. Posisi tersebut menentukan sikap yang akan dilakukan oleh aktor yang terlibat, yang mana sikap yang diambil tersebut akan mempengaruhi aktor lain dan kebijakan luar negeri yang akan diambil. Menurut konsep *Bureaucratic Politics* lingkaran pemerintah birokrasi terbagi menjadi empat aktor yaitu, *Chief*, *staff*, *Indian*, dan *ad-hoc*. Dalam birokrasi politik, dimana seorang aktor berdiri bergantung pada dimana sebelumnya aktor tersebut duduk, yang mana secara vertikal posisi *Chief*, *Staff*, dan *Indian* memiliki tuntutan yang berbeda dalam menentukan kebijakan, dimana dalam pemerintahan Korea Selatan posisi tersebut adalah Presiden, Staf Dewan Negara terutama Menteri Luar Negeri dan Menteri Unifikasi, dan Majelis Nasional.

3.1.1 *Chief and Staff*

Sebagai aktor yang memiliki peran sebagai *Chief*, Presiden memiliki tuntutan untuk menyelidiki permukaan awal dari masalah yang akan menjadi perhatiannya sebelum berurusan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, memperbaiki ketidakpastian untuk mempertimbangkan risiko yang akan ditanggung. Dalam hal kebijakan luar negrinya dengan Korea Utara, berangkat dari ideologi liberal yang dianutnya, Moon Jae-In memilih untuk mengedepankan perdamaian dan kerja sama. Moon Jae-In beserta staff Dewan Negara-nya yaitu Kang Kyung-Hwan dan Menteri Unifikasi Cho Myung-Gon kembali menerapkan *Policy of Peace and Prosperity* sebagai langkah untuk mencapai perdamaian. Dalam hal ini, tugas dari *Chief and Staff* adalah mengusulkan perjanjian dan kebijakan kepada Majelis Nasional, meyakinkan oposisi dengan kompromi dan juga diskusi. Moon Jae-In dan staf Dewan Negara berada pada posisi ini sebab memiliki peran sebagai pembuat kebijakan yang memiliki kekuasaan tertinggi, oleh karena itu kebijakan ini dibuat dan diajukan pada Majelis Nasional.

3.1.2 *Indian*

Indian merupakan pejabat pemerintahan resmi yang memiliki wewenang untuk mengurus permasalahan tertentu yang mana dalam hal kebijakan Korea Selatan posisi ini diperankan oleh Kementerian Unifikasi yang telah dibentuk sejak 1969 untuk mempromosikan re-unifikasi dua Korea dan pada tahun 1998 mendapatkan pengakuan yang lebih baik lagi dibawah pemerintahan Kim Dae-Jung untuk mempromosikan dialog antar-Korea. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam tajuk birokrasi pemerintahan Moon Jae-In, Menteri Unifikasi

Cho Myung-Gon yang telah memiliki pengalaman mengurus KTT kedua Korea melakukan tugasnya sesuai dengan arah politik partai DKP, mengundang Korea utara dalam olimpiade Pyongchang, hingga berhasil mempertemukan kedua kepala negara dalam Intern Korean Summit dan menyepakati sebuah perjanjian. Kemudian aktor lain yang tidak kalah penting adalah Kang Kyung-Hwan dimana sebagai Menteri Luar Negeri, Kang Kyung-Hwa memiliki dasar bahwa hubungan Amerika dan Korea utara adalah dasar dari berjalannya *The Policy of Peace and Prosperity*, sehingga menjaga hubungan dengan kedua negara tersebut penting dilakukan. Cho Myung-Gon dan Kang Kyung-Hwa berada di posisi Indian sebab memiliki peran sebagai aktor yang memiliki peran dan urusan langsung terhadap isu kebijakan yang dibuat, oleh sebab itu keduanya memiliki sikap politik yang satu arah dengan ideologi yang dianut oleh partai pendukung dan kepala negara.

3.1.3 Ad Hoc

Pemain *Ad Hoc* merupakan aktor pemerintahan yang lebih luas yang juga berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil untuk penerapan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, *Ad Hoc* merupakan anggota legislatif yang menduduki kursi parlemen di Majelis Nasional, terutama kedua partai yang menguasai sebagian besar kursi parlemen, yaitu DPK sebagai pemegang kekuasaan terbanyak dan LKP sebagai oposisi terkuat. Dalam pembuatan kebijakan, yang harus dilakukan oleh aktor-aktor dalam posisi ini adalah berdiskusi menurut kepentingan politik masing-masing. Dalam hal ini, diskusi antar kedua partai mengenai kebijakan dengan Korea utara berputar pada permasalahan ideologi, dan perbedaan kepentingan masing-

masing partai. DPK dan LKP memiliki peran sebagai *Ad Hoc* sebab keduanya berada dalam ranah politik yang lebih luas, yaitu Majelis Nasional yang mana didalamnya terjadi diskusi dan kompromi. Dalam hal ini kedua partai merupakan rival sebab memiliki ideologi yang berbeda yang menyebabkan adanya tarik-menarik kepentingan.

Melihat dari pembagian peran dan posisi masing-masing aktor dalam pemerintahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktor-aktor dalam masing-masing posisi *Chief, Staff, Indian*, dan *Ad Hoc* secara vertikal memiliki garis yang sama, yang membuat birokrasi pemerintahan Moon Jae-In memiliki *power* yang sangat kuat.

3.2 Prioritas inti, Persepsi dan Inti dari Permasalahan

Pada awal masa pemerintahannya, Moon Jae-In memprioritaskan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada kinerja pemerintah mengingat Presiden yang menjabat sebelumnya dimakzulkan oleh masyarakat karena permasalahan korupsi. Namun, melihat langkah awal yang diambil Moon Jae-In adalah mencoba menyelesaikan masalah-masalah eksternal seperti penguatan hubungan dengan Amerika dan berusaha memulihkan hubungan dengan China pasca isu THAAD yang sebelumnya berdampak buruk bagi hubungan diplomasi kedua negara dan juga mencoba menyelesaikan konflik maritim yang terjadi dengan Jepang selaku negara yang secara geografis berdekatan, menunjukkan bahwa prioritas inti Korea Selatan adalah membuka jalan untuk membangun kembali kerja sama dengan

Korea Utara dan mendorong Korea Utara melakukan denuklirisasi secara menyeluruh demi menciptakan kawasan semenanjung Korea yang damai. (Chung-Min Lee, 2018).

Namun solusi dari masalah tersebut menjadi berbeda apabila dilihat dari persepsi lain, mengingat perbedaan terbesar yang terjadi dalam pemerintahan Korea Selatan sendiri adalah perbedaan ideologi, yang menimbulkan adanya dua solusi yang saling bertolak belakang di setiap pemerintahannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada BAB II bagian penolakan LKP terhadap Deklarasi Panmunjom, inti dari permasalahan yang terjadi ada pada tingkat legislatif, dimana partai oposisi terbesar yaitu LKP memiliki otoritas untuk menolak kebijakan yang diajukan oleh eksekutif, karena untuk meratifikasi isi Deklarasi Panmunjom yang memiliki beban keuangan yang signifikan memerlukan suara bulat dari parlemen. LKP masih menganggap bahwa kerja sama dengan Korea Utara akan mengancam keamanan nasional karena Korea Utara belum sepenuhnya melakukan denuklirisasi. Selain itu, LKP juga menganggap bahwa Moon Jae-In seharusnya fokus pada masalah domestik terutama masalah ekonomi.

Prioritas Moon Jae-In dalam menjalankan pemerintahannya adalah menjalankan kembali *The Policy of Peace and Prosperity* untuk menjalin kerja sama ekonomi antar dua Korea demi menciptakan perdamaian dan menuju reunifikasi. Meskipun prioritas tersebut dapat menimbulkan resiko pada masalah ekonomi yang terbengkalai, Moon Jae-In menegaskan bahwa dengan mencapai resolusi untuk kerja sama ekonomi dengan Korea Utara, maka hal tersebut akan memicu perekonomian Korea Selatan yang sedang memburuk menjadi lebih baik.

3.3 Kepentingan, Resiko, dan Kekuasaan

Mengalami tumpang tindih kepentingan dapat dialami oleh sebuah pemerintahan yang menjalankan sebuah kebijakan yang tidak memiliki kepastian yang solid. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko yang harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan demi memenuhi tujuan yang ingin dipenuhi. Ada tiga kepentingan utama yang menjadi prioritas Moon Jae-In, yaitu (1) Meluncurkan upaya anti korupsi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (2) Pemulihan hubungan dengan Korea Utara dan meminta komitmen dari Kim Jong-Un untuk melakukan denuklirisasi penuh (3) Memperjuangkan intervensi negara terhadap ekonomi atau yang disebut sebagai J-nomics (Chung-Min Lee, 2018).

Dalam hal ini, meskipun kepentingan utama Moon Jae-In adalah melakukan upaya anti korupsi dalam pemerintahan, namun sikapnya jelas menunjukkan bahwa Moon Jae-In memprioritaskan *The Policy of Peace and Prosperity* sebagai kunci utama arah politik pemerintahannya. Jika Kim Jong-Un menyetujui Amerika dan melakukan denuklirisasi secara penuh, maka poin-poin dalam Deklarasi Panmunjeon dapat dijalankan dan kebijakan *Peace and Prosperity* yang didukung Moon Jae-In sejak lama akan berjalan lancar.

Masyarakat Korea Selatan sendiri, sebagian besar mendukung perdamaian antar kedua Korea yang pada masa pemerintahan ini berhasil mencapai berbagai kesepakatan. Namun kebanyakan orang lebih peduli pada kesejahteraan ekonomi

jangka panjang dibandingkan dengan perdamaian kedua Korea, mengingat solusi untuk permasalahan ekonomi yang ditawarkan Moon Jae-in tidak efektif. Moon Jae-In melakukan peningkatan upah minimum kerja, meningkatkan tarif pajak perusahaan, dan mempersingkat minggu kerja dari 68 jam menjadi 52 jam. Namun solusi tersebut belum berhasil untuk meningkatkan perekonomian Korea Selatan dan malah menambah masalah baru bagi masyarakat. Akibatnya, pada agustus 2018 rating Moon Jae-In mengalami penurunan (Suzuki, 2018).

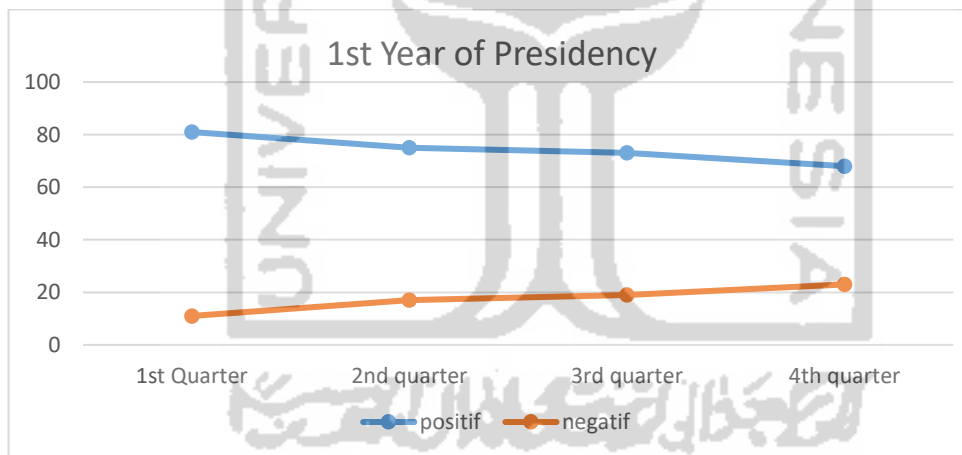
DPK telah berhasil mendominasi arena politik domestik berkat kepopuleran kebijakan *Peace and Prosperity* yang diterapkan pada Korea utara. Meskipun kepentingan utamanya adalah mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat akibat korupsi pada pemerintahan sebelumnya, kepopuleran Moon Jae-In membuat masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintahannya. Meski begitu, masalah ekonomi yang mengalami penurunan harus diselesaikan oleh Moon Jae-In mengingat hal ini akan berpengaruh pada *approval rating*-nya sebagai presiden.

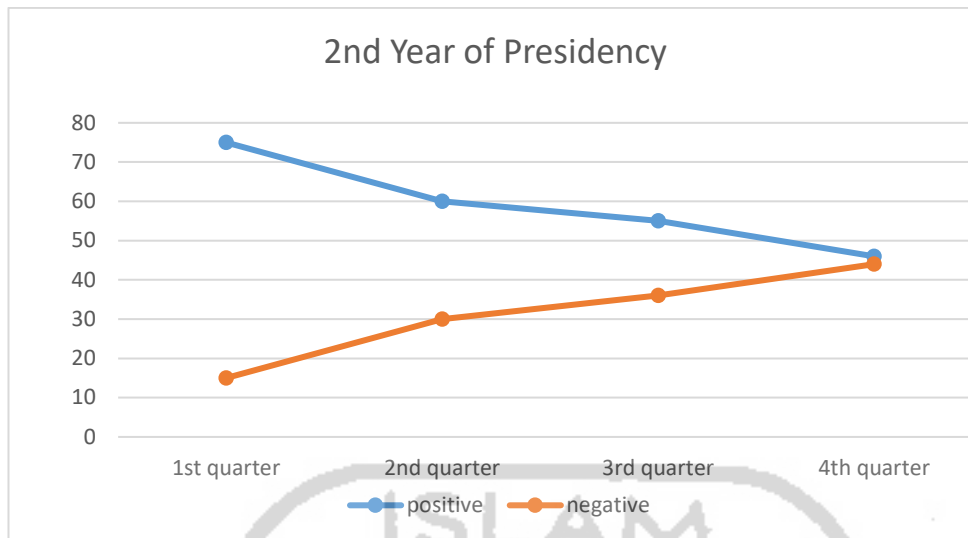
3.4 Permasalahan dalam Permasalahan

The Policy of Peace and Prosperity dibuat oleh pertama kali oleh Kim Dae-Jung untuk meredam konflik bersenjata yang masih sering terjadi di kawasan semenanjung Korea, akibat perang Korea yang terjadi lebih dari 60 tahun lalu. Kebijakan ini berhasil membuat kedua Korea menjalin kerja sama ekonomi berupa industri yang dibangun di daerah Kaesong yang meningkatkan perekonomian Korea Utara. Meskipun begitu, kebijakan ini juga dianggap gagal pada

pemerintahan sebelum Moon Jae-In, akibat ketimpangan ekonomi yang merugikan Korea Selatan dan hanya menguntungkan pihak Korea Utara yang pada saat itu masih aktif melakukan percobaan nuklir. Sejauh ini, kebijakan yang diterapkan kembali oleh Moon Jae-In tersebut berjalan baik meskipun kerja sama yang layak untuk meningkatkan perekonomian belum berjalan lancar.

Meskipun begitu, fokus Moon Jae-In terhadap kebijakan ini berefek pada kebijakan ekonomi Moon Jae-In yang dianggap oleh oposisi dan juga masyarakat terbengkalai. Dalam survey yang dilakukan lembaga Gallup Korea yang bertajuk *Gallup Korea Daily Opinion* terdapat data *approval rating* yang menunjukkan penilaian masyarakat terhadap presiden. Berikut data yang menunjukkan *approval rating* presiden Moon Jae-In selama dua tahun menjabat sebagai presiden.





(Gallup, 2019)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rating Moon Jae-In semakin menurun memasuki kuartal keempat pada tahun kedua kepemimpinannya. Penurunan peringkat ini disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang membuat harga *real estate* semakin meningkat dan masalah upah minimum kerja yang tidak sesuai membuat usaha-usaha menengah harus melakukan PHK karena upah yang terlalu tinggi, dan pengurangan jam kerja yang membuat perusahaan-perusahaan yang sulit untuk menyelesaikan proyek kerjanya karena pengurangan jam kerja. Apabila Moon Jae-In tidak melakukan tindakan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut, hal ini akan menyebabkan hambatan bagi Moon Jae-In dalam menjalankan kebijakannya dan berefek pada hubungan antar-Korea yang sudah pemerintahannya bangun (Ferrier, 2018).

Kebijakan yang dijalankan oleh Moon Jae-In memiliki resiko yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang muncul dari berbagai aspek. Dalam hal ini, kebijakan ekonomi Moon Jae-In yang menimbulkan masalah ekonomi domestik akan berpengaruh pada menurunnya *approval rating* dari publik dan akan berefek pada kebijakan *Peace and Prosperity*.

3.5 *Action Channels*

Untuk mencapai tujuan dari kepentingan kebijakan yang dibuat setiap aktor dalam lingkaran birokrasi politik saling tawar-menawar berdasarkan dengan peran masing-masing aktor. Berdasarkan dari peran masing-masing pemain dalam lingkaran birokrasi tersebut, dapat dilihat bahwa pemain-pemain dalam birokrasi pemerintahan Korea memiliki peran dalam porsi masing-masing. *Chief dan staf* memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Peran Moon Jae-In dan Staf Dewan Negara terutama Kementerian Unifikasi pada hubungan antar dua Korea adalah membuat sebuah kebijakan, membuat usulan perjanjian, dan membuat rancangan anggaran dasar kebijakan tersebut untuk kemudian mengajukan hal tersebut pada Majelis Nasional untuk disetujui. Dalam hal ini, Moon Jae-In telah mengajukan rancangan anggaran untuk menjalankan hal-hal yang ada pada Perjanjian Panmunjeon untuk merealisasikan kerja sama dengan Korea Utara. Namun, anggaran tersebut belum bisa di realisasikan pada tingkat Majelis Nasional karena meskipun kursi parlemen pada Majelis Nasional dikuasai oleh DPK yang mendukung pemerintahan Moon Jae-In, namun penolakan dari LKP sangat mempengaruhi sebab untuk mengeluarkan dana yang membebani Negara,

membutuhkan suara bulat dari seluruh anggota parlemen pada tingkat Majelis Nasional. Meskipun begitu, Moon Jae-In tetap dapat menjalankan kebijakan *Peace and Prosperity* sebab Perjanjian Pyongyang yang sudah disetujui kedua Korea tidak membebani keuangan negara dan tidak melanggar undang-undang karena merupakan langkah-langkah untuk menuju perdamaian dan unifikasi.

Sebagai *Ad Hoc*, Berangkat dari ideologi yang berbeda, tindakan yang dilakukan kedua partai tersebut-pun sangat berbeda. LKP yang lebih memilih mengurus masalah dalam negeri dan menganggap menetapkan sanksi merupakan cara terbaik untuk menekan nuklir Korea Utara, dan DPK yang mengutamakan kerja sama dengan Korea Utara demi perdamaian dan peningkatan ekonomi. DPK memiliki peran untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sempat hilang setelah skandal politik Park Geun-Hye pada 2016 lalu dengan menerapkan sistem politik yang lebih bersimpati pada rakyat, dan memperluas elemen-elemen demokrasi partisipatif demi mewujudkan demokrasi yang berpusat pada rakyat. Pada juni 2018, meskipun mengalami penurunan peringkat, partai Moon Jae-In banyak memenangkan pemilihan gubernur dan wali kota daerah yang mana presentase kemenangannya cukup jauh dari LKP. DPK memperoleh 51,42 persen suara, LKP mendapat 27,76 persen suara, dan 3,19 persen suara lainnya merupakan gabungan suara dari partai-partai kecil yang lain. (NEC, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap partai yang mendukung Moon Jae-In tersebut, dan juga mengingat LKP memiliki reputasi yang buruk sejak Park Geun-Hye dimakzulkan pada 2017 lalu.

Peran masing-masing aktor dalam birokrasi pemerintahan Moon Jae-In menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan Moon Jae-In dapat berjalan secara maksimal dengan dukungan dari oposisi, yaitu LKP. Namun, sebagai Oposisi yang memiliki ideologi berbeda, LKP tetap pada prinsipnya dan terus mengkritik pemerintahan Moon Jae-In apabila kebijakannya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Meski begitu, kelemahan utama LKP yang disebabkan oleh dimakzulkannya Park Geun-Hye membuat LKP kehilangan banyak suara dari masyarakat, yang membuat DPK dapat menjalankan perannya dalam membangun kepercayaan publik dengan mudah. Pada akhirnya, pemerintahan Moon Jae-In tetap dapat menjalankan kebijakan *Peace and Prosperity* dan tetap memiliki kepercayaan dari masyarakat meski mengalami penurunan rating.

3.6 Aksi sebagai Politik

Perdebatan antara LKP dan DPK terlihat hanya berputar pada perbedaan ideologi, namun perbedaan tersebut memiliki arti yang lebih dalam. Kedua partai telah menjadi rival politik semenjak awal negara Korea Selatan berdiri. Nama dari kedua partai tersebut memang sangat sering berganti, namun ideologi dan pondasi dasar kedua partai tersebut secara konstan tetap sama.

Masing-masing partai memiliki pandangan dan sentimen sendiri dalam melihat satu sama lain. DPK selalu melabeli LKP pro-Jepang dan melakukan pengkhiantan ketika Korea Selatan dikuasai oleh Jepang. Dengan sejarah Korea-Jepang yang hingga saat ini masih menyakitkan bagi Korea Selatan, sentimen DPK

terhadap LKP tersebut membuat perbedaan ideologi kedua partai semakin dalam. Sementara LKP sendiri selalu menggunakan label Komunis Merah (*Bbalgaengyi*) pada DPK dan menuduh anggota DPK merupakan mata-mata dan telah menjadi advokat Korea Utara. (Lee, 2018)

Sentimen anti-komunisme di kalangan masyarakat Korea Selatan, terutama kalangan usia lanjut yang kebanyakan menyimpan luka lama perang Korea masih menonjol. Hal ini digunakan oleh LKP untuk menyerang DPK dengan mengarahkan ketakutan kelompok tersebut pada DPK. Melihat pola politik ini, Moon Jae-In dapat mengelompokkan bahwa fokus utama hal yang harus dilakukan untuk menjalankan kebijakannya adalah menghadapi LKP selaku oposisi. Harapan untuk menuju denuklirisasi dan perdamaian di semenanjung Korea berjalan lancar setidaknya dilihat secara eksternal, namun secara internal, perdebatan konstan masih terjadi.

Saat ini, dengan pulihnya hubungan kedua Korea, LKP hanya dapat menggunakan sentimen tersebut sebagai alasan untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan *Peace and Prosperity*. Ditambah lagi, banyaknya simpatisan LKP yang semenjak pemakzulan Park Geun-Hye pada 2017 lalu telah meninggalkan partai tersebut dan kebanyakan menyisakan pendukung-pendukung radikal. (Lee, 2018) Hal ini membuat pemerintahan Moon Jae-In harus melihat sesuai dengan fakta bahwa persepsi LKP tersebut tidak akan berubah dengan mudah, maka dari itu tantangan Moon Jae-In adalah harus melihat segala sesuatu dengan kaca mata yang lebih luas.

3.7 *Streams of outcomes*

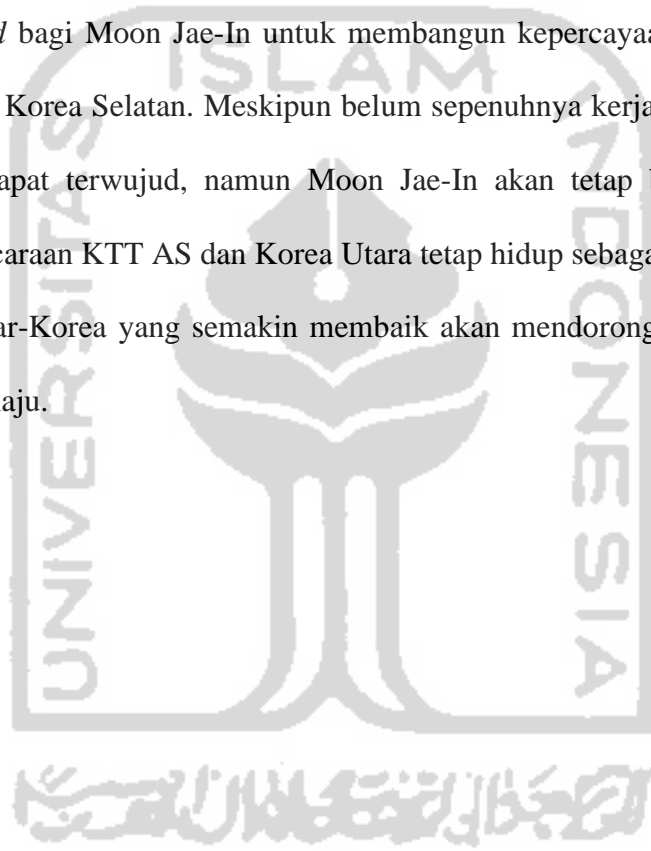
Keputusan yang diambil pemerintah merupakan kolase dari tawar-menawar yang dilakukan. Dalam hal menjalankan kebijakan luar negerinya dengan menjalin hubungan baik dengan Korea Utara, pemerintah menjadikan hal tersebut sebuah prioritas. Melihat bagaimana rencana Moon Jae-In dalam membuat berbagai pertemuan KTT untuk mencapai kesepakatan dengan Korea Utara dan Amerika, yang menghasilkan berbagai pencapaian, meskipun pencapaian tersebut memiliki banyak resiko.

Dalam menerapkan kebijakan *Peace and Prosperity*, Moon Jae-In berhasil menjadi fasilitator utama untuk pertemuan Trump dan Kim Jong-Un, yang mana dari pertemuan tersebut kedua negara menghasilkan kesepakatan dua negara untuk menjalin hubungan diplomatik baru dan menegaskan kembali perjanjian Panmunjeom yang telah disepakati dua Korea. Moon jae-In juga berhasil melakukan pembukaan kantor penghubung kedua Korea di wilayah industri Kaesong sebagai media untuk tetap berhubungan dengan Korea Utara.

Selain itu, Perjanjian Militer Komprehensif yang disepakati kedua Korea dan merupakan salah satu dari isi perjanjian Panmunjeom mulai terealisasi (Ferrier, 2019). Kedua Korea mulai menghentikan kegiatan latihan militer di sepanjang garis demarkasi Militer. Pada zona laut, kedua Korea telah menutupi barel baterai artileri dan senjata kapal di sepanjang pesisir. Kemudian dengan melibatkan *United Nations Command* yang dipimpin oleh Amerika, kedua pihak mulai memindahkan

ranjau darat dari Join Security Area (JSA) dan mulai melucuti semua personel militer yang berada di JSA. Realisasi implementasi perjanjian komprehensif ini menandai adanya pengurangan ketegangan militer di Semenanjung Korea. Selain itu, Amerika dan Korea Selatan juga sepakat menanggukkan beberapa latihan gabungan militer yang dianggap Korea Utara provokatif (Panda, 2018).

Kemajuan hubungan antara kedua Korea yang terjadi merupakan *bargaining card* bagi Moon Jae-In untuk membangun kepercayaan pada oposisi dan masyarakat Korea Selatan. Meskipun belum sepenuhnya kerja sama ekonomi kedua Korea dapat terwujud, namun Moon Jae-In akan tetap berusaha untuk menjaga pembicaraan KTT AS dan Korea Utara tetap hidup sebagai mediator, dan perdamaian antar-Korea yang semakin membaik akan mendorong perekonomian menjadi lebih maju.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada analisis tentang penerapan kembali *The Policy of Peace and Prosperity* pada pemerintahan Moon Jae-In, yang berkaitan pada pro kontra yang terjadi dalam internal pemerintahan Korea Selatan, terutama antara kedua partai yang menguasai kursi parlemen Majelis Nasional. Jika dilihat dari kacamata *Bureaucratic Politic* yang mengedepankan tawar-menawar dan tarik menarik kepentingan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Posisi dan aksi dari Birokrasi Pemerintahan Moon Jae-In yang beraliran liberal memiliki satu garis vertikal yang kuat baik dari posisi *Chief, Staff, Indian, maupun Ad Hoc*.
2. Prioritas kepentingan dalam kebijakan ini memiliki persepsi yang berbeda dari DPK dan LKP, namun jika dilihat dari segi kekuasaan DPK memiliki power yang lebih unggul dari oposisi.
3. Adanya tumpang tindih kepentingan antara kebijakan ekonomi domestik dan *The Policy of Peace and Prosperity*, sebab salah satunya terabaikan. Hal tersebut diatasi dengan dominasi politik domestik oleh DPK.
4. Permasalahan resiko yang harus diperhitungkan adalah menurunnya *approval rating* dari publik, yang sedikit banyak akan mempengaruhi dukungan untuk *The Policy of Peace and Prosperity*.

5. Peran dari masing-masing aktor dalam lingkaran permainan birokrasi telah disalurkan dalam satu aksi yaitu diskusi dan kompromi di meja Majelis Nasional, yang menjadi sorotan utama tarik-menarik kepentingan antar DPK dan LKP.
6. DPK memiliki keunggulan lebih dalam memainkan aksi politik untuk mempengaruhi publik sebab LKP kehilangan banyak dukungan pasca skandal korupsi Park Geun-Hye.
7. *Bargaining card* yang dimiliki oleh Moon Jae-In dapat digunakan sebagai senjata untuk terus meyakinkan oposisi agar mendukung penuh *The Policy of Peace and Prosperity*, antara lain adalah : Pertemuan Inter Korean Summit yang menghasilkan Deklarasi Panmunjom dan Deklarasi Pyongyang, Korea utara mulai melucuti nuklirnya terutama di wilayah semenanjung Korea yang telah bertahun-tahun rawan konflik bersenjata, Membuka kembali kantor penghubung kedua Korea di wilayah Kaesong untuk menjaga hubungan kedua Korea dan berhasil menjadi mediator antara Amerika dan Korea utara yang akhirnya membuat langkah hubungan diplomatik baru.

Dapat disimpulkan juga, bahwa meskipun menimbulkan resiko seperti penurunan ekonomi domestik, penurunan *approval rating* dari publik, dan menuai banyak kritik dari oposisi, Moon Jae-In tetap menyelesaikan masalah tersebut dengan power yang Ia memiliki. Dengan pulihnya hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang ditunjukkan lewat perjanjian kedua pihak yang disetujui, Moon Jae-In dapat menunjukkan adanya kemajuan dari hubungan kedua Korea yang

beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan dan banyak konflik yang terjadi di Semenanjung. Hal ini merupakan sebagai *Bargaining card* bagi Moon Jae-In untuk membangun kepercayaan pada Oposisi dan Publik, agar tujuan dari *The Policy of Peace and Prosperity* yang merupakan kerja sama ekonomi, terciptanya perdamaian, dan proses re-unifikasi dapat terwujud dengan sempurna.

4.2 Saran

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kekuatan Birokrasi Politik pada sebuah pemerintahan yang kuat dapat mengantarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut pada tujuan utamanya, selama pemerintahan tersebut memiliki tujuan utama yang jelas, dan peran setiap aktor yang ada didalamnya mendukung menjadi satu garis vertikal. Dapat juga dilihat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki berbagai pengaruh seperti pengaruh dukungan publik, pengaruh dari oposisi, hingga pengaruh eksternal lain seperti Negara sekutu yang kurang lebih menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

Dengan kesimpulan yang telah dibuat, penulis memiliki saran untuk penelitian lanjutan yang dapat membahas secara lebih dalam keberlanjutan dari kebijakan *The Policy of Peace and Prosperity* yang Moon Jae-In ambil, mengingat hingga penelitian ini dibuat, pembicaraan KTT AS – Korea Utara masih menemui jalan buntu, padahal kesuksesan kerja sama Korea Selatan dan Korea Utara bergantung pada negosiasi yang di lakukan oleh Washington dan Pyongyang.

Daftar Pustaka

- Afinaton, L. A. (2014). *Decision Making in Internasional Relations : A theoritical Analysis. Canadian Social Science vol.10, no.5, 2014* , hal. 252-253.
- Alfira. (2017, maret 10). *Presiden Korea Selatan resmi dipecat karena skandal*. Dipetik october 12, 2018, dari BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39227516>
- Alison, G. T. (1971). *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown and Company.
- Bae, H.-J. (2017, july 7). *full text of Moon's speech at the Korber Foundation*. Dipetik october 8, 2018, dari Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170707000032>
- BBC. (2010, November 20). *Dunia kecam serangan Korea Utara atas Pulau Yeonpyeong*. Dipetik october 11, 2018, dari BBC: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/11/101124_dunia_korut
- BBC. (2017, May 9). *Moon Jae-In : South Korean liberal claims presidency*. Diambil kembali dari BBC NEWS: www.bbc.com/news/world-asia-39855956
- BBC. (2018, Januari 10). *Korut dan Korsel sepakat gelar perundingan militer*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42598604>
- Berlinger, J. (2019, Januari 26). *Why a military spat between Japan and South Korea could snowball into crisis*. Diambil kembali dari CNN: <https://edition.cnn.com/2019/01/26/asia/south-korea-japan-spat-intl/>
- Chance, Z. U. (2019, April 24). *North Korea's leader meets Putin. Will Trump be jealous?* Diambil kembali dari CNN News: <https://edition.cnn.com/2019/04/24/asia/north-korea-kim-putin-trump-analysis-intl/index.html>
- Choong, N. K. (2005). *The Roh Moo Hyun Government's Policy towards North Korea*. USA: East-West Center.
- Chun, C. (2017). *The North Korean Nuclear Threat and South Korea's Deterrence Strategy*. Dalam S. C. Kim, & M. D. Cohen, *North Korea and Nuclear Weapons : Entering the New Era of Deterrence* (hal. 113). United States of America: Georgetown University Press.
- CNN. (2007, december 20). *Lee to toughen stance on North Korea*. Dipetik october 12, 2018, dari CNN: <http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/12/19/skorea.election/>

- CNN, I. (2018, september 08). *Korea Selatan dan AS Mulai Pecah Kongsi*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: www.cnnindonesia.com/internasional/2018008055836-113-328727/korea-selatan-dan-as-mulai-pecah-kongsi-soal-korea-utara
- Cordesman, A. H., & Hess, A. (2013). *The Evolving Military Balanca in the Korean Peninsula and Northeast Asia*. Washington: Center for Strategic and International Studies.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches*. california: sage.
- Frank, R. (2017, july 13). *President Moon's North Korea Strategy*. Dipetik october 13, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/07/president-moons-north-korea-strategy/>
- Hagan, J. D. (2001). Does Decision Making Matter ? Systematic Assumptions vs. Historical Reality in International Relations. *jstor*, 5-6.
- Holsti, O. R. (2004). Theories of International Relations . Dalam M. J. Paterson, *Explaining the History of American Foreign Policy* (hal. 69-76). New York: Cambridge University Press.
- Hur, M.-Y. (2018). Moonshine in Korean Peninsula. Dalam M.-Y. Hur, *The Six Party Talks on North Korea : Dynamic Interactions Among Principal States* (hal. 345-347). sejong city: Springer Nature.
- Jae-Won, K. (2018, November 5). *South Korean opposition threatens president's peace budget*. Diambil kembali dari Nikkei Asia: <https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/South-Korean-opposition-threatens-president-s-peace-budget>
- Kim, C. (2017, september 6). *South Korea's Moon says he and Putin share understanding on North Korea*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-southkorea-moon/south-koreas-moon-says-he-and-putin-share-understanding-on-north-korea-idUSKCN1BH0PO>
- Krasner, S. D. (1982). *structural causes and regime consequences: regimes as Intervening Variabels*. New York: Cornell University Press.
- McGuire, K. (2018, Februari 27). *China-South Korea relations: A Delicate Detente* . Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/china-south-korea-relations-a-delicate-detente/>
- Ministry of Unification*. (2013). Diambil kembali dari Moon Jae-In's Policy on the Korean Peninsula : http://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyIssues/koreanpeninsula/goals/
- Mintz, A., & Jr., K. D. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University Press.

- Moon, C.-I. (2012). *The Sunshine Policy*. South Korea: Yonsei University Press.
- NN. (2017, Mei 9). *Rakyat Korsel memilih presiden beraliran Liberal Moon Jae In*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39859242>
- Park, S. (2017, october 27). *Engagement vs. Hard-line: South Korea's Next North Korea Policy*. Diambil kembali dari STIMSON: <https://www.stimson.org/content/engagement-vs-hard-line-south-korea%E2%80%99s-next-north-korea-policy-0>
- Park, S. N. (2017, May 19). *Moon's Secret Weapons Is Sunshine*. Diambil kembali dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2017/05/19/moons-secret-weapon-is-sunshine-south-korea-kim-jong-un/>
- Sang-Hun, C. (2017, september 4). *Allies for 67 years, U.S. and South Korea split over North Korea*. Diambil kembali dari New York Times: www.nytimes.com/2017/9/04/world/asia/north-korea-nuclear-south-us-alliance.html
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Snyder, R. C. (1962). *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the study of International Politics*. New York : Glencoe .
- Snyder, S. A. (2017). *South Korea at the Crossroads: Autonomy and Alliance in an Era of Rival Powers*. New York : Columbia University Press .
- Stiles, M. (2017, mei 9). *Liberal Moon Jae-In is winner in South Korea's presidential election*. Diambil kembali dari Los Angeles times: www.latimes.com/world/asia/la-fg-south-korea-presidential-election-20170509.html
- Suastha, R. D. (2018, april 29). *Tolak Damai dengan Korut, Pedemo Korsel Desak Moon Mundur*. Diambil kembali dari CNN Indonesia : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180429161414-113-294499/tolak-damai-dengan-korut-pedemo-korsel-desak-moon-mundur>
- sugiyono. (2009). *metode kualitatif, kuantitatif dan r&d*. Bandung: alfabeta.
- Sung Young Jang, H. K. (2018, Desember 01). *Can Russia Play a Positive Role on the Korean Peninsula?* Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/12/can-russia-play-a-positive-role-on-the-korean-peninsula/>
- Sung, K.-Y. (2012). Theoritization of Kim Dae Jung's Pursuit of Inter-Korean Economic Exchanges: Complex Interdependence model. *The Korean Journal of Area Studies* , 245.
- Taylor, A. (2017, oktober 31). *South Korea and China normalize relations after THAAD dispute*. Diambil kembali dari Washington post : <https://www.washingtonpost.com/world/south-korea-and-china-move-to->

normalize-relations-after-thaad-conflict/2017/10/31/60f2bad8-bde0-11e7-af84-d3e2ee4b2af1_story.html?utm_term=.85a49f106bea

- Valerie Gelezeau, K. D. (2013). *De-Bordering Korea : Tangible and Intangible Legacies of the Sunshine Policy*. New York : Routledge.
- Waldman, E. (2019, Januari 28). *Japan and South Korea's Military Dispute Pushes Relations to a New Low*. Diambil kembali dari world politics review: <https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/27299/japan-and-south-korea-s-military-dispute-pushes-relations-to-a-new-low>
- Young-Kwan, Y. (2017, Mei 9). *Kebijakan Ostpolitik Korea Selatan Pemerintahan Moon* . Diambil kembali dari Project Syndicate: <https://www.project-syndicate.org/commentary/moon-jae-in-foreign-policy-north-korea-by-yoon-young-kwan-2017-05/indonesian>
- Bae, H.-J. (2017, July 7). *full text of Moon's speech at the Korber Foundation*. Dipetik October 8, 2018, dari Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170707000032>
- bbc, n. (2018, April 26). *Moon Jae-In : South Korea's President with humble roots*. Dipetik oktober 15, 2019, dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-39860158>
- Berlinger, J. (2019, Januari 26). *Why a military spat between Japan and South Korea could snowball into crisis*. Dipetik februari 12, 2019, dari CNN: <https://edition.cnn.com/2019/01/26/asia/south-korea-japan-spat-intl/>
- Chance, Z. U. (2019, April 24). *North Korea's leader meets Putin. Will Trump be jealous?* Dipetik oktober 28, 2019, dari CNN News: <https://edition.cnn.com/2019/04/24/asia/north-korea-kim-putin-trump-analysis-intl/index.html>
- Choe, S. H. (2018, Agustus 15). *South Korea's Leader Proposes Broad Economic Cooperation with North*. Dipetik februari 12, 2019, dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/08/15/world/asia/south-korea-north-moon-jae-in.html>
- Frank, R. (2017, July 13). *President Moon's North Korea Strategy*. Dipetik October 13, 2018, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/07/president-moons-north-korea-strategy/>
- Hyonhee Shin, J. L. (2018, Desember 6). *How a South Korean Security Law is becoming obsolete amid thaw with North Korea* . Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-securitylaw-ana/how-a-south-korean-security-law-is-becoming-obsolete-amid-thaw-with-north-korea-idUSKBN1O50FV>

- Jee Hyung-Shin, Y. H.-K.-O. (2017, desember 31). *2017 Korea Media Panel Survey*. Dipetik oktober 4, 2019, dari Korea Information Society Development Institute: http://m.kidsi.r.kr/mobile/repo/res_view.m?controlNoScr=5&key1=32770&key2=13799key3=&category=3&publishYear=&selectPage=1&category1=1&category2=2&category3=3&category4=4
- John, H. (2018, oktober 5). *South Korean foreign minister on nuclear talks: 'We want to take a different approach'*. Dipetik september 15, 2019, dari Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/south-korean-foreign-minister-on-nuclear-talks-we-want-to-take-a-different-approach/2018/10/04/61022629-5294-4024-a92d-b74a75669727_story.html
- Jung, Y. G. (1996). Politics in the National Assembly and Foreign Policy. *Euijung Yeongu (Korean Journal of Legislative Studies)*, no. 2, 142. Dipetik september 14, 2019
- Kai, J. (2017, May 26). *Why are South Korean Politics so messy ?* Dipetik oktober 15, 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/05/why-are-south-korean-politics-so-messy/>
- kennedy, m. (2019, agustus 18). *seoul's older generations takes it to the street*. Dipetik november 17, 2019, dari slide night: <https://www.slidenight.co/blog/2019/8/18/seouls-older-generation-takes-it-to-the-streets>
- Kim, C. (2018, April 27). *Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity, and Unification of the Korean Peninsula*. Dipetik Januari 28, 2020, dari Reuters: uk.reuters.com/article/uknorthkorea-southkorea-summit-statement/panmunjom-declaration-for-peaceprosperity-and-unification-of-the-korean-peninsula-idUKKBN1HY193
- Kim, H.-J. (2018, September 16). *Skepticism Rise in S. Korea ahead of 3rd summit with North*. Dipetik november 17, 2019, dari AP News: <https://apnews.com/9166ae681360456c9029de27f74d1cc3>
- Kim, J. (2017). *Impact Player : Cho Myung-gyon*. Washington : Center for Strategic and International Studies.
- Kim, J. (2018). *Public Opinion and Presidential Power in South Korea*. New York: Council of Foreign Relations. Dipetik oktober 5, 2019
- Kim, Y. H. (2018). *Bureaucratic Politics in South Korean Foreign Policy-Making*. New York: Council on Foreign Relations.

- Kim, Y. M. (2011). *The Politics of Coalition in South Korea*. London: Routledge.
- Kwon, K. (2017, Mei 10). *South Korea election : Moon Jae In declared winner*. Dipetik oktober 14, 2019, dari CNN News: <https://edition.cnn.com/2017/05/09/asia/south-korea-election/index.html>
- Lee, G. (2018). *Strengthening the National Assembly's Influence on South Korean Foreign Policy*. New York: Council of Foreign Relations. Dipetik september 14, 2019
- McCurry, J. (2018, Januari 9). *North Korea agrees to send athletes to winter olympics after talks with South*. Dipetik januari 28, 2020, dari The Guardian: theguardian.com/world/2018/jan/09/north-south-korea-talks-winter-olympics-nuclear
- McGuire, K. (2018, Februari 27). *China-South Korea relations: A Delicate Detente*. Dipetik februari 13, 2019, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/china-south-korea-relations-a-delicate-detente/>
- Ministry of Unification. (2013). Dipetik februari 13, 2019, dari Moon Jae-In's Policy on the Korean Peninsula: http://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/policyissues/koreanpeninsula/globals/
- Moon, J.-I. (2017). *Fate, Destiny and Moon Jae-In*. Seoul: BOOKPAL.
- Moon, S.-H. (2018). *A social-pathological Research of the Birth of Taegeukgi Crowd*. Seoul: Korean Society for Social Philosophy. Dipetik november 9, 2019
- NN. (2019, September 26). *South Korea Government*. Diambil kembali dari Constitution and Government of South Korea: korea.net/government//constitution-and-government/executive-legislative-judiciary
- Park, S. N. (2017, May 19). *Moon's Secret Weapons Is Sunshine*. Dipetik februari 13, 2019, dari Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2017/05/19/moons-secret-weapon-is-sunshine-south-korea-kim-jong-un/>
- Ray, M. (2017, Agustus 18). Moon Jae-In : President of South Korea. *President of South Korea*, hal. 1. Dipetik oktober 15, 2019
- Rhee June-Woong, C. H.-J.-J.-H. (2011). South Korea Media System: Toward Democratization Model. *Korea Social Sciences Review / Vol.1 No.1,2011:303-337*, 328-321. Dipetik oktober 4, 2019

- Sang-Hun, C. (2017, september 4). *Allies for 67 years, U.S. and South Korea split over North Korea*. Dipetik februari 13, 2019, dari New York Times: www.nytimes.com/2017/9/04/world/asia/north-korea-nuclear-south-us-alliance.html
- Santi, N. (2018, April 28). *Deklarasi Panmunjom Langkah Awal Denuklirisasi*. Dipetik oktober 28, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180428125137-106-294312/deklarasi-panmunjom-langkah-awal-denuklirisasi>
- Sofwan, R. (2018, April 27). *Deklarasi Panmunjom : Korsel dan Korut sepakat Denuklirisasi*. Dipetik oktober 28, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180427164513-113-294172/deklarasi-panmunjom-korut-dan-korsel-sepakat-denuklirisasi>
- Sung-bae Kim, H.-r. L.-s. (2013). *A Desirable Decision-Making System of Foreign and Security Policy for South Korea 2013 EAI Special Report* . Seoul: EAI Special Report .
- Taylor, A. (2017, oktober 31). *South Korea and China normalize relations after THAAD dispute*. Dipetik oktober 16, 2019, dari Washington post: https://www.washingtonpost.com/world/south-korea-and-china-move-to-normalize-relations-after-thaad-conflict/2017/10/31/60f2bad8-bde0-11e7-af84-d3e2ee4b2af1_story.html?utm_term=.85a49f106bea
- The Minjoo Party*. (2019, Desember 8). Dipetik Januari 31, 2020, dari Code, Party Constituion, Party Regulations, Code of Ethics: theminjoo.kr/introduce/rule
- The National Assembly of The Republic of Korea*. (2019, Agustus 28). Dipetik agustus 28, 2019, dari Members of National Assembly: http://korea.assembly.go.kr/mem/mem_04.jsp
- Times, K. (2018, September 09). *Pyongyang Declaration*. Dipetik Januari 28, 2020, dari The Korea Times: koreatimes.co.kr/www/nation/2018/09/103-255848.html
- Yeo, J. S. (2018, Oktober 24). *North Korea is not State that can sign treaty with S. Korea*. Dipetik november 6, 2019, dari Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20181024000711>
- Yonhap, N. (2018, April 27). *Full text of joint declaration issued at inter-Korean summit*. Dipetik oktober 28, 2019, dari Yonhap News Agency: <https://en.yna.co.kr/view/AEN20180427013900315>
- Young-Kwan, Y. (2017, Mei 9). *Kebijakan Ostpolitik Korea Selatan Pemerintahan Moon* . Diambil kembali dari Project Syndicate: <https://www.project-syndicate.org/view/full.aspx?cid=120170509>

syndicate.org/commentary/moon-jae-in-foreign-policy-north-korea-by-
yoon-young-kwan-2017-05/indonesian

- Alison, G. T. (1971). *Essence of Decision : Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown and Company.
- Chung-Min Lee, K. B. (2018, November 16). *President Moon Jae-In and the Politics of Inter-Korean Detente*. Dipetik Maret 9, 2020, dari Carnegie Endowment for International Peace: carnegieendowment.org/2018/11/16/president-moon-jae-in-and-politics-of-inter-korean-detente
- Ferrier, K. (2018, Agustus 23). *Moon's economic policies face their first major hurdle*. Dipetik Februari 26, 2020, dari The Diplomat.
- Ferrier, K. (2019, November 14). *Moon Jae-In at the halfway mark*. Dipetik Februari 28, 2020, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/11/moon-jae-in-at-the-halfway-mark/>
- Gallup. (2019). *Gallup Korea Monthly Report Daily Opinion*. Seoul: Gallup Korea. Dipetik Februari 12, 2020
- Jo, H.-R. (2018). *Moon's constitutional amendment calls four-year two term presidency*. Seoul: The Korea Herald. Dipetik Februari 17, 2020, dari www.koreaherald.com/amp/view.php%3fud=20180322000802
- Jun-suk, Y. (2018, Agustus 2018). *Kaesong office plan sparks worries over sanction violation*. Dipetik Februari 12, 2020, dari Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180821000756>
- Kim, J.-W. (2018, Maret 2018). *South Korea's Moon calls for two presidency*. Dipetik Februari 27, 2020, dari Nikkei Asia.
- Lee, Y.-C. (2018, Maret 21). *The deeper meaning of South Korea's constitutional debate*. Dipetik Februari 21, 2020, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/03/the-deeper-meaning-of-south-koreas-constitutional-debate/>
- NEC. (2018). *Mayoral and Gubernatorial Election Results*. Seoul: National Election Commission. Dipetik Maret 7, 2020, dari <http://info.nec.go.kr/>
- Panda, A. (2018, November 2). *Koreas Successfully Implement September 2018 Comprehensive Military Agreement*. Dipetik maret 10, 2020, dari The Diplomat: thediplomat.com/2018/11/koreas-successfully-implement-september-2018-comprehensive-military-agreement
- Suzuki, S. (2018, Juni 19). *Instead of Spurring Growth, Moon's Wage Hikes Trigger Layoffs*. Dipetik Maret 9, 2020, dari Nikkei Asian Review: asianikkei.com/Economy/Instead-of-Spurring-Growth-Moon-s-Wage-Hikes-Trigger-Layoffs.

